

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan surat kabar di Indonesia menjadi demikian penting karena surat kabar telah dimanfaatkan dalam kehidupan politik sehari-hari sebagai medium komunikasi politik di negeri ini. Khususnya peranan surat kabar dalam liputan berita Pemilu legislatif 2009. Surat kabar mencari informasi mengenai kegiatan-kegiatan politik serta membantu dalam pembentukan sikap masyarakat agar terhindar dari golongan putih sehingga proses Pemilu Legislatif sejalan dengan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan pelaksanaan maksud dan tujuan Pemilu Legislatif itu sendiri.

Namun tidak dapat disangkal mendekati Pemilu legislatif, suhu politik semakin meningkat. Bahkan di beberapa daerah tertentu telah terjadi gesekan-gesekan konflik. Konflik yang terjadi bukan hanya antara beberapa partai sesama Organisasi Peserta Partai (OPP) tetapi juga terjadi di internal partai. Konflik yang menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa serta pelanggaran HAM lainnya, yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Timbulnya kerusuhan ini disebabkan adanya aksi provokator atau kelompok yang menggunakan kesempatan dalam situasi tersebut. (Kompas, 10 Januari 2009:3)

Tentunya untuk menghasilkan Pemilu legislatif 2009 yang bersih, pers dan semua pihak tanpa terkecuali harus bertanggung jawab atas keberhasilan Pemilu legislatif 2009 yang aman dan tertib. Dari kondisi seperti itu meletakkan media massa khususnya surat kabar dalam posisi strategis diantara lembaga-lembaga sosial yang ada di tengah masyarakat. Letak strategis (apapun bentuknya) sebagai media antara yang menghubungkan institusi-institusi sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Menghubungkan masyarakat dengan Negara, penguasa dan sebaliknya (sebagai medium komunikasi politik) serta antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.

Untuk itu media massa tidak boleh memihak dengan satu kekuatan apapun yang ada dalam masyarakatnya kecuali norma dan nilai yang membentuknya serta melingkupinya. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti menyadari sepenuhnya bahwa perkembangan dan pertumbuhan media massa tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan pertumbuhan sistem politik di negeri ini, bahkan sistem media massa merupakan subsistem dari sistem politik yang ada.

Kita menyadari media massa sudah sejak lama digunakan sebagai saluran komunikasi politik. Kehadirannya tidak saja bisa dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai ambisi-ambisi politik tertentu akan tetapi media massa juga mempunyai kemampuan untuk memilah-milah mana yang penting dan mana yang tidak perlu diberitakan. Tentunya kehadiran surat kabar sebagai salah satu komponen media massa dalam kehidupan politik Indonesia tidak lagi diragukan. Dengan demikian fungsinya tidak hanya sekedar sebagai saluran pendidikan

politik bagi warganya akan tetapi secara makro turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penelitian pertama yang pernah dilakukan di Amerika Serikat adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 1944 oleh sekelompok ilmuwan sosial, yaitu *Lazersfeld, Benard Barelson* dan *Hazel Gandet* yang telah berhasil mengungkapkan betapa besar perana surat kabar di dalam pembentukan pendapat dan sikap pembaca di dalam cara memberikan suara mereka. (Suwardi Harsono, 1993:24)

Walaupun penelitian yang dilakukan Lazersfeld dan rekan-rekannya ini berbeda didalam pendekatannya, namun hal yang perlu dicatat ialah bahwa penelitian tersebut telah menggunakan surat kabar sebagai awal dari mana isu politik pertama kali dilontarkan. Oleh karena itu dalam konteks ini pula mau tidak mau para peserta Pemilu khususnya dalam konteks Pemilu di Indonesia, para kontestan Pemilu ingin memanfaatkan semaksimal mungkin untuk tujuan politik mereka.

Bagaimanapun dengan segala kekurangan dan akses yang ada, pers kita telah semakin melangkah ke suatu era dimana pers mampu memberikan kontribusi yang besar dalam penciptaan kehidupan politik yang lebih demokratis dan transparan. Dengan kata lain, komunikasi politik mempersambungkan semua bagian sistem politik, dan juga masa kini dan masa lampau sehingga dengan demikian aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan.

Perkembangan paling signifikan yang terjadi dalam pers di Indonesia adalah semakin jelas kecenderungan sejumlah media untuk tidak hanya menempatkan diri sebagai *defining agency* yang kerap berpretensi memiliki kapasitas untuk mendefinisikan setiap realitas sosial tetapi juga sebagai *public spheres*, sebuah forum yang memberikan akses terhadap berbagai segmen publik untuk mengetengahkan versi definisi mereka sendiri mengenai realitas sosial tertentu dalam penerbitan pers yang bervariasi. Berbagai media, contohnya kini telah menyediakan suatu artikel opini atau rubrik-rubrik dimana setiap parpol bisa mengetengahkan versi definisi realitas sosial mereka, baik dalam bentuk penilaian tentang suatu isu permasalahan atau berupa visi dan misi partai mereka.

Salah satu surat kabar di Indonesia yang telah memberikan kontribusinya sebagai medium komunikasi politik di Indonesia dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu Legislatif, dengan penerbitan pers yang bervariasi. Pada kali ini kontribusi Kompas dalam Pemilu Legislatif 2009 menyajikan suatu kolom komentar **Spanduk Calon Legislatif 2009**. Berisi komentar yang ditulis oleh para calon legislatif mengenai topik-topik yang bervariasi diangkat surat kabar Harian Umum Kompas terkait isu-isu yang aktual dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga setiap calon legislatif yang mewakili dari masing-masing partai politiknya dapat mengetengahkan pernyataan atau opini.

Kolom komentar Spanduk Calon Legislatif 2009 disajikan surat kabar Kompas sebagai akses komunikasi agar masyarakat secara tidak langsung lebih fokus untuk mengenal calon legislatif yang mereka dukung serta dapat mengetahui sebagian visi dan misi dari komentar yang diberikan calon legislatif

dalam menjabarkan pernyataan, pandangan, saran bahkan kritikan mengenai setiap topik yang diangkat Kompas.

Berbagai permasalahan yang dijadikan topik didalam kolom komentar Spanduk Calon Legislatif baik menyangkut isu-isu yang menjadi permasalahan pemerintah maupun isu-isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Seperti konflik di Nusa Tenggara Barat tentang pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan calon legislatif berdasarkan suara terbanyak bukan nomor urut. Berbagai komentar dari para calon legislatif dalam kolom Spanduk Calon Legislatif. Berupa opini, saran serta kritik yang ditujukan kepada kebijakan pemerintah. (Kompas, 10 Januari 2009:3)

Topik lainnya yang menyangkut permasalahan penyelenggaraan Pemilu legislatif yaitu terhambatnya kaum perempuan menembus kursi legislatif dan dianggap terjadi penyelewengan pada keputusan Mahkamah Konstitusi Pasal 214 Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu tidak punya kekuatan mengikat secara hukum sehingga penempatan perempuan pada nomor urut dapat dipastikan. (Kompas, 4 Februari 2009:A1).

Berbagai komentar yang diberikan calon legislatif mengenai permasalahan atau isu-isu aktual tersebut disajikan dalam surat kabar Kompas bahkan disajikan khusus dalam kolom komentar Spanduk Calon Legislatif. Tokoh-tokoh calon legislatif di dalam kolom komentar tersebut sebagai komunikator yang memberikan komentar berupa opini secara bebas dan lebih bersifat individu. bahkan dari setiap komentar yang ada, dapat dilihat kecenderungan isi serta persamaan dan perbedaan opini yang diberikan oleh setiap calon legislatif

mengenai topik -topik yang diangkat surat kabar harian umum Kompas dalam kolom komentar **Spanduk Calon Legislatif**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimanakah kecenderungan isi opini yang tampak dari kolom komentar Spanduk Calon Legislatif dilihat dari tema, proses opini, nada opini dan sifat opini dalam liputan khusus Pemilu Legislatif pada Harian Umum Kompas dalam kurun waktu 3 Februari 2009 – 3 Maret 2009.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kecenderungan isi opini yang tampak dari kolom komentar Spanduk Calon Legislatif dilihat dari tema, proses opini, nada opini dan sifat opini dalam liputan khusus Pemilu legislatif pada Harian Umum Kompas dalam kurun waktu 3 Februari – 3 Maret 2009.

D. Manfaat Penelitian

1. Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan pendalaman studi komunikasi pada umumnya dan studi komunikasi politik pada khususnya.
2. Penelitian surat kabar yang menggunakan pendekatan analisis isi terutama mengenai kontribusi surat kabar sebagai media kampanye Pemilu di Indonesia, diharapkan dapat digunakan sebagai perbendaharaan penelitian bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

E. Kerangka Teori

1. Pers sebagai saluran komunikasi

Komunikasi berasal dari kata “*communicatus*” sebuah bahasa latin dan dalam bahasa Inggrisnya “*communication*” yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Sementara menurut Laswell “komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan “siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan akibat atau hasil apa” (Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?)”.

Secara umum proses komunikasi dalam masyarakat dapat berlangsung dalam enam tingkatan. Mulai dari komunikasi personal, komunikasi antar pribadi, komunikasi dalam kelompok, komunikasi antar kelompok atau asosiasi, komunikasi organisasi dan komunikasi dengan masyarakat luas. Dalam komunikasi yang ditujukan dengan masyarakat luas, terdapat dua bentuk kegiatan yakni yang pertama komunikasi langsung misalnya ceramah atau pidato, kedua, komunikasi yang dilakukan dengan media massa atau lazim disebut dengan komunikasi massa. (Vardiansyah Dani, 2004:33)

Komunikasi massa diadopsi dari istilah bahasa Inggris yaitu “*mass communication*” artinya komunikasi media massa, yang berarti komunikasi dengan menggunakan media massa. Istilah media yang digunakan dalam komunikasi massa adalah pers. Terdapat dua pengertian pers yakni pers dalam pengertian sempit dan pers dalam pengertian luas. Dimana pengertian pers dalam pengertian sempit menunjukkan pada media cetak sedangkan pers dalam

pengertian luas menunjuk pada semua jenis media massa (media cetak dan media elektronika). (BM. Mursito, 2006:2)

Definisi yang dikemukakan Little Jhon mengenai komunikasi massa yaitu

“komunikasi massa adalah suatu proses dengan mana organisasi-organisasi media memproduksi dan mentransmisikan pesan-pesan kepada publik yang besar, melalui proses dimana pesan-pesan itu dicari, digunakan, dimengerti dan dipengaruhi oleh audience.”

(BM. Mursito 2006:3)

Ini artinya proses produksi dan tranmisi pesan dalam komunikasi massa sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan kepentingan audiens. Seperti dalam penelitian ini dimana alat media massa yang digunakan adalah media cetak khususnya surat kabar yang memuat kolom komentar Spanduk Calon Legislatif sebagai akses untuk memenuhi kebutuhan informasi audiens mengenai calon legislatif dalam menyukseskan Pemilu Legislatif 2009. Sehingga akan menimbulkan suatu interaksi dari pembaca dalam pembentukan sikap mereka.

Pesan yang disampaikan melalui media cetak, akan menyentuh pihak penerima, maka pihak penerima akan memeberikan reaksi kembali, hingga akhirnya akan terjadi interaksi timbale balik antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Dimana Salah satu pengertian komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dari seorang atau dari suatu institusi yang dapat melahirkan suatu reaksi pada pihak penerima pesan. (Suwardi Harsono, 1993:41)

Apabila batasan pengertian komunikasi tersebut dikaitkan dengan respon pembaca sebagai akibat pemberitaan dalam media, maka yang dimaksud dengan interaksi disini adalah tidak lain terjadinya tukar-menukar informasi yang

dituangkan dalam surat kabar atau pers dengan pendapat yang muncul dalam pers tersebut. Hal ini adalah sebagai akibat pemberitaan dalam pers atau adanya pendapat yang kontroversial dari suatu peristiwa yang terjadi.

Informasi tersebut tujuannya sekedar untuk memberikan penerangan kepada pembaca. Hal ini dilakukan pers karena salah satu fungsinya adalah menyalurkan semua informasi kepada pembaca yang dianggap atau diasumsikan memang membutuhkan informasi tersebut. Disamping itu juga harus diingat bahwa sifat pers pengaruhnya bisa dirasakan kemudian atau biasa dikenal dengan istilah *delay effect* atau *Joseph T. Klapper* menyebutkan dengan *limited effect*. Media bukan penyebab utama terjadinya suatu perubahan, akan tetapi merupakan unsur yang sifatnya komplementer atas suatu keadaan yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain media memiliki sifat mendukung dan memperkuat (*reenforce*) suatu keadaan yang sudah ada sebelumnya. (Susanto Astrid, 1974:35)

Surat kabar sebagai saluran informasi politik di Indonesia diakui sebagai saluran yang berkemampuan untuk menyampaikan lebih dari sekedar informasi politik. Artinya surat kabar dapat dibuktikan mempunyai efek politik dalam suatu kelangsungan sistem politik suatu masyarakat. Kekuatan media, dalam kaitan ini menurut Gurevitch dan Blumler bersumber dalam tiga hal struktural, psikologis dan bersifat normatif. (www.google.com)

Akar struktural kekuatan media massa bersumber pada kemampuannya yang unik untuk menyediakan khalayak bagi para politisi yang ukuran dan komposisinya tidak akan diperoleh para politisi dimaksud melalui alat yang lain. Sedangkan akar psikologis dari kekuatan media bersumber pada hubungan

kepercayaan dan keyakinan yang berhasil diperoleh (meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda) oleh organisasi media dari anggota khalayaknya masing-masing. Ikatan saling percaya ini tumbuh berdasarkan pada pemenuhan harapan khalayak selama ini dan validasi dari hubungan percaya mempercayai di masa lampau antara media yang bersangkutan dengan khalayaknya. (www.google.com)

Kombinasi antara akar struktural dan akar psikologis tadi memungkinkan media mendudukan diri di tengah-tengah antara politisi dan khalayak dan sekaligus mencampuri proses politik yang berlangsung. Campur tangan tersebut mungkin saja tidak disukai oleh banyak pihak termasuk kalangan politik. Maka, tampillah sifat normatif media yang bersumber pada prinsip-prinsip demokrasi mengenai kebebasan menyatakan pendapat, kebutuhan akan perlindungan terhadap warga negara dari penyalahgunaan kekuatan politik, yang memberi legitimasi kepada peran independensi media dari kendali politik. (Mcquail Dennis, 1991:110)

Rakyat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Dengan hal itu, mestinya masyarakat mempunyai akses terhadap informasi itu. Peran itu merupakan tugas pers untuk mencari informasi yang dalam dan benar, kemudian memaparkan informasi itu kepada masyarakat sehingga mereka tahu persis suatu kejadian atau peristiwa. Untuk itu, pers sudah saatnya menghadirkan wacana persoalan bangsa untuk dijadikan jembatan dialog dalam menyelesaikan persoalan bangsa dalam pembangunan Indonesia dalam segala bidang. (Suwardi Harsono, 1993:32)

Banyak ilmuwan komunikasi yang berpendapat bahwa jika surat kabar ingin lebih berperan dalam setiap pembangunan, termasuk pembangunan politik, haruslah ada kemampuan menyajikan informasi yang relevan dengan apa yang dibutuhkan khalayak. Karena perannya demikian besar, maka kemungkinan membawa pengaruh kepada khalayak dengan sendirinya akan besar pula (Suwardi Harosono, 1993:33)

Pada saatnya nanti (sekarang ini pun sudah terjadi) masyarakat akan memilih dan mempercayai penerbitan pers yang benar-benar independen, jujur baik dalam kemasan beritanya, enak bahasanya dan memberi wawasan. Oleh alam semua penerbitan pers akan diseleksi. Tidak selamanya muatan-muatan yang hanya mementingkan sensasi selalu mendapatkan tempat dihati pembaca.

Oleh karena itu, suatu batasan perlu diberikan terhadap istilah ataupun konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua disiplin ilmu komunikasi maupun ilmu politik digunakan secara terpadu yaitu dalam pengertian komunikasi politik.

Konsep komunikasi politik telah mengalami perkembangan dalam pengertiannya, dimana tiap bagian dari sistem politik terjadi komunikasi politik mulai dari proses penanaman nilai (sosialisasi politik atau pendidikan politik) sampai pada pengartikulasian dan penghimpunan aspirasi dan kepentingan, terus kepada proses pengambilan kebijaksanaan, pelaksanaannya dan penilaian terhadap kebijaksanaan tersebut. Tiap bagian ataupun tahap itu dipersambungkan pula oleh komunikasi politik.

Komunikasi politik seperti disistem-sistem politik lainnya juga dipraktekkan dalam kehidupan politik di Indonesia. Setiap hari tokoh-tokoh politik dan pemerintahan menyampaikan pernyataan-pernyataan (baik resmi maupun tidak resmi), pendapat-pendapat pada berbagai forum dan berbagai komentar yang sebagai objek komunikasi; keanekaragaman pesan yang dipergunakan bertambah; perkembangan dan kualitas turut serta dan diwakilinya masyarakat di dalam komunikasi selalu didorong. (Effendy Onong Uchjana,1992:163)

Sementara itu apa yang dimaksud dengan komunikasi politik dalam penelitian ini menurut Dan Nimmo (1978:7) dalam memberikan batasan tentang komunikasi politik :

“ Komunikasi dapat dikategorikan mempunyai nilai politik, apabila yang dimaksud didasarkan atas konsekuensinya atau akibatnya baik secara aktual maupun potensial yang mengatur tingkah laku manusia di bawah kondisi-kondisi pertentangan”. (Nimmo Dan, 1978:7)

Apabila dilihat dari pengertian Nimmo, maka batasan yang ada dalam pengertian tersebut bahwa komunikasi mempunyai nilai politik bila arus informasi atau pesan yang disampaikan dari sumber kepada sasarannya mengandung pesan politik. Tekanan lebih banyak diberikan kepada kontroversial atas sisi pesan atau apa yang diperlambangkan dalam pesan yang ada atau dengan kata lain lebih ditekankan kepada efek dari pesan politik yang disampaikan.

Batasan Nimmo akan terlihat beda apabila dibandingkan dengan pengertian komunikasi politik dari Lord Windlesham (1972) dalam karyanya *what is political communication* bahwa :

“Political communication is the deliberate passing of a political message by a sender to a receiver behave in a way the might not otherwise have done”

(Komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikasi berperilaku tertentu). (Uchjana Onong, 1992:158)

Dalam pengertian yang diberikan oleh Lord Windlesham bahwa sebelum suatu pesan politik disampaikan kepada komunikan dengan tujuan untuk mempengaruhinya. Windlesham lebih menekankan pengertian komunikasi politik pada tujuan. Sedangkan pengertian komunikasi politik Nimmo lebih menekankan pada efek yang muncul pada komunikan.

Sebenarnya makna tujuan definisi yang diberikan Windlesham dan efek dari Nimmo pada hakekatnya adalah sama. Perbedaannya hanya terletak pada keterlekatan pada komponennya: tujuan melekat pada komponen komunikator sedangkan efek pada komponen komunikan.

Beda halnya dengan pengertian yang diberikan oleh Denis McQuail (1986:133-149) bahwa dalam komunikasi politik yang terpenting adalah pesan-pesan politik yang dilihat dari sisi sumber maupun bentuknya. McQuail sendiri tidak memberikan batasan-batasan tertentu di dalam pengertian komunikasi politik. Jadi suatu bentuk komunikasi akan mempunyai arti politik apabila informasi yang disampaikan memberi tekanan kepada makna isi pesan politiknya.

Dari penjelasan yang diberikan oleh beberapa ahli mengenai komunikasi politik, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua macam batasan di dalam komunikasi politik pada umumnya yaitu komunikasi politik dalam arti luas dan komunikasi dalam arti sempit.

Komunikasi politik dalam arti luas sudah jelas bahwa tekanannya pada setiap bentuk penyampaian pesan baik berupa lambang, kata-kata terucap, tertulis ataupun melalui pesan-pesan visual baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada sejumlah sasarannya. Sedangkan tekanan dalam komunikasi politik dalam arti sempit terdapat pada setiap bentuk penyampaian pesan, baik berupa lambang, kata-kata terucap ataupun dalam bentuk tulisan, baik visual maupun isyarat yang dapat mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung kedudukan seseorang yang berada dalam puncak suatu struktur kekuasaan tertentu dan yang ada dalam suatu sistem. (Suwardi Harsono, 1993:44)

Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada penggunaan pengertian komunikasi politik dalam arti luas. Tetapi tidak menutup kemungkinan dalam penelitian ini juga akan bersangkutan dengan pengertian komunikasi politik dalam arti sempit. Karena dalam Pemilu 2009 ini, setiap tekanan yang terdapat dalam pesan yang disampaikan dari komunikator dapat mempengaruhi komunikan (pembaca) dalam jumlah banyak, selain itu juga pesan yang ada dapat mempengaruhi kedudukan elite politik, apalagi pesan yang disampaikan bukan hanya dari sumber atau komunikator elite politik tetapi juga berasal dari pemerintah ataupun non pemerintah.

Pengertian komunikator politik sangat bervariasi, maka Dan Nimmo (1978:12-13) secara tegas memberikan perbedaan dalam pengertian komunikator politik. Bahwa yang dimaksud komunikator politik tidak lain adalah para pemimpin politik yaitu mereka yang aktif mengantisipasi pesan yang relevan dengan suatu konflik. Dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Para politisi yang memang hidupnya banyak bergantung pada jabatan-jabatan resmi dalam pemerintahan. Mereka ini tidak lain adalah para pegawai negeri, dan golongan ini biasanya disebut dengan *the pols* atau *politicians*
2. Para politisi yang dijuluki sebagai *the professionals*. Mereka yang mempunyai keahlian dalam memanfaatkan pentingnya komunikasi di dalam mencapai tujuan politik. Mereka ini biasanya dijuluki *the pors* atau *professionals*.
3. Semua warga negara yang tidak termasuk pada kategori *politicians* ataupun *professionals*, tetapi mereka aktif dan mengerti politik. Mereka disebut dengan *the vols*. Keterlibatan mereka hanya sambilan di dalam politik dan dasarnya hanya sukarela.

Dalam penelitian ini, komunikator politik yang digunakan dalam analisis isi adalah lebih banyak mendekati pada batasan yang diberikan Dan Nimmo baik sebagai politisi komunikator profesional maupun aktivis. Walaupun pengertian politik tidak digunakan secara tegas di dalam penelitian ini, namun demikian istilah ini secara implisit ada dan digunakan. Oleh karena itu, tidak salahnya apabila dalam uraian studi ini pengertian politik perlu dijelaskan kedudukannya. Agar dengan adanya istilah politik memberikan makna yang jelas pada komunikasi politik. Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah istilah yang ada kaitannya dengan partai politik dan Pemilu legislatif.

2. Pemilu Legislatif

Pada tahun 2009 rakyat Indonesia kembali menyelenggarakan Pemilihan Umum yang ke-10. Pemilu 2009 memiliki sistem yang sama dengan sistem Pemilu 2004 dimana sistem pelaksanaan Pemilu dilakukan dalam dua tahap yaitu tahapan Pemilu Legislatif (9 April 2009) dan tahapan Pemilu Presiden (Juli 2009).

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilu dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1999, pasal 1, ayat (1) adalah :

Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 1945.

Istilah lain mengenai Pemilu masih dijelaskan dalam Undang-Undang Republik nomor 3 tahun 1999 pada pasal 45, ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Partai politik peserta Pemilu mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama selama melaksanakan kampanye.

Menurut Arbi Sanit (1997:158-159), berdasarkan fungsinya Pemilihan Umum mempunyai empat fungsi utama, yaitu :

1. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah
2. Pembentukan perwakilan politik rakyat
3. Sirkulasi elit penguasa
4. Pendidikan politik

Menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Pemilu legislatif, maka menurut Miriam Budiarjo (2006:173) legislatif adalah :

Legislatif adalah lembaga yang “legislate” atau membuat Undang-Undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat. Maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat.

Maka Pemilu Legislatif merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam penetapan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem Pemilu legislatif 2009 ini mengatur pemilihan calon legislatif dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam hubungannya dengan demokratisasi komunikasi, dari sekian banyak jenis media massa adalah pers atau surat kabar yang paling berperan karena berfungsi sebagai penyalur pikiran dan perasaan masyarakat dan peran surat kabar sebagai *political persuader* yang mampu menganalisis *political issue* yang dituangkan dalam bentuk rubrik, artikel, kolom komentar serta tajuk rencana surat kabar.

3. Surat Kabar

Pers atau surat kabar adalah yang paling berperan karena berfungsi sebagai penyalur pikiran dan perasaan masyarakat. Keampuannya sebagai *political persuader* tampak pada analisis dan interpretasinya terhadap *political issue* yang dituangkan dalam bentuk fakta dan opini di dalam surat kabar (Uchjana Onong, 1992:163)

Apabila kita amati perkembangan pers dewasa ini, tampak bahwa selain pemberitaannya, berita-berita yang disajikannya semakin berbobot. Isi media cetak pada dasarnya terdiri dari fakta dan opini yang pada umumnya berupa informasi, pendapat, gagasan atau saran juga perasaan khalayak berupa kekecewaan, kesedihan, kebingungan, harapan, keinginan bahkan kemarahan.

Kesemuanya itu meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang sewajarnya diperhatikan dan ditanggapi oleh pemerintah, lembaga, instansi atau siapa saja yang berkepentingan.

Surat kabar dapat menyajikan segala macam aspirasi, namun penyajian informasi dalam bentuk liputan berita tidak mungkin terjadi tanpa melalui *gate keeper* (pentapis berita) sebagai pintu terakhir yang melakukan seleksi. Karena itu, pengertian *gate keeper* dalam kehidupan pers diartikan sebagai pintu terakhir disajikan atau tidaknya suatu informasi untuk kebutuhan pembaca. Mereka ini pada umumnya adalah para pemimpin redaksi atau redaktur pelaksana dari surat kabar. (Siregar, A, & Suarjana, I Made, 1995:20-21)

Pentapis informasi tahap akhir ini tidak ubahnya sebagai agen yang menyampaikan informasi dalam berita kepada calon pembaca yang kebutuhan informasinya relatif mempunyai relevansi dengan apa yang dibutuhkan oleh pembaca sendiri. Dengan demikian apa yang disampaikan *gate keeper* adalah semua informasi yang sudah mengalami proses penyaringan dan produknya adalah informasi atau berita yang sifatnya *non purposive* seperti apa yang diperkirakan akan menjadi kebutuhan para calon pembacanya. Yang dimaksud dengan *non purposive* disini adalah pesan-pesan yang disampaikan dengan tidak mempunyai maksud tertentu dari surat kabar tersebut. Jadi yang disampaikan adalah suatu fakta informasi. Dengan demikian maka peran *gate keeper* adalah pentapis terakhir terhadap keluar masuknya informasi untuk suatu liputan dalam surat kabar. (Suwardi Harsono, 1992:35)

Dalam mengembangkan fungsinya surat kabar mempunyai ciri-ciri khusus yakni ; publisitas, berhubungan dengan pesan yang disampaikan menyangkut kepentingan umum; universalitas, surat kabar memuat aneka berita mengenai kejadian di seluruh dunia serta tentang segala aspek kehidupan manusia; Aktualitas, menyangkut kecepatan penyampaian berita mengenai kejadian di masyarakat kepada umum; periodisitas, bahwa surat kabar terbit periodik dan teratur; serta oleh Astrid S. Susanto (1974:24) ditambah afinitas unsur ketergantungan yang merupakan salah satu cara atau usaha untuk menjalin hubungan antara pihak penyelenggara surat kabar dengan pembacanya.

Surat kabar yang bisa mencapai khalayak atau rakyat secara massal itu dipergunakan oleh kaum idealis untuk melakukan *sosial control* menyangkut realita kehidupan masyarakat sehingga menjadi suatu realita bagi media. Maka dari hal ini, surat kabar tidak hanya bersifat normatif tetapi juga persuasif. Bukan saja menyiarkan informasi tetapi juga membujuk dan mengajak khalayak untuk mengambil sikap tertentu, agar berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Bentuk jurnalistik yang bersifat persuasif ini antara lain tajuk rencana (editorial), artikel opini dan pelaporan selidik (*investigative reporting*). (Uchjana Onong, 1992:62)

Banyak definisi berita atau *news* yang dapat diketahui dari berbagai literature yang satu sama lainnya berbeda disebabkan pandangannya dari sudut yang berlainan. Dari sekian banyak definisi berita yang dapat dibaca dalam berbagai buku atau berkala disini hanya akan diketengahkan satu definisi saja yang dapat dinilai paling berkena.

Definisi tersebut yang dikemukakan oleh Prof. Mitchel V. Charn (dalam bukunya reporting), yang berbunyi sebagai berikut :

“News is the timely report of fact opinion of either interest or importance, or both, to considerable number of people.”

(Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang mengandung hal yang menarik minat atau penting atau kedua-duanya, bagi sejumlah besar penduduk). (Uchjana Onong, 1992:67)

Pada dasarnya isi media cetak khususnya surat kabar terbagi menjadi dua bagian yakni fakta dan opini. Fakta sering dipahami sebagai suatu yang ada dan benar-benar terjadi. Fakta merupakan hasil pengamatan, penjelasan teoritis, konseptualisasi atau investigasi jurnalistik. Fakta tidak ditentukan melainkan dibuat oleh wartawan. Fakta-fakta yang ada ditangkap sebagai realitas sosial untuk selanjutnya diproses menjadi berita. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap berita merupakan fakta tetapi tidak semua fakta dapat dijadikan berita. Hanya fakta yang mengandung nilai berita (*news Value*) yang dapat disebut sebagai berita. (BM, Mursito, 2006:159)

Sementara opini merupakan pendapat, pandangan dan pemikiran dari masyarakat luas untuk menanggapi permasalahan yang dimuat dalam penerbitan pers. Biasanya tulisan opini dalam media cetak disebut dengan artikel opini. Dimana dalam kategorisasinya artikel opini dapat dikelompokkan menjadi analisis berita, kolom komentar, kritikan dan tajuk rencana. (Djuroto Totok, 2000:69)

4. Kolom Komentar

Kolom merupakan salah satu dari bentuk artikel opini. Dimana gaya penulisan opini yang makin populer di kalangan surat kabar, karena kolom dikemas jauh lebih ringkas (umumnya sekitar 4 sampai 6 ribu karakter), lebih menitik (fokus) mengenai suatu permasalahan. Kolom disebut bersifat topikal karena suatu kolom tidak terikat dengan suatu peristiwa dan hanya membahas suatu permasalahan yang lagi hangat di tengah masyarakat. (Siregar, A, & Suarjana, I Made, 1995:36)

Salah satu isi dari kolom yaitu komentar yang berbobot evaluasi, menggunakan *technical judgments* atas peristiwa yang dikomentari bersifat lepas dalam arti bukan merupakan realitas tersusun. Oleh karena itu komentar ditulis bertautan dengan peristiwa (*news peg*) dan ditulis oleh mereka yang sedikitnya telah pernah berkecimpung di bidang yang bersangkutan. Kolom komentar lebih bersifat sederhana, berbobot evaluasi atas peristiwa bersifat lepas dan topikal serta ditulis oleh mereka yang menguasai bidangnya. (Siregar, A, & Suarjana, I Made, 1995: 37-38)

Kolom komentar Spanduk calon legislatif yang dimuat oleh Harian Umum Kompas merupakan akses untuk calon legislatif menyatakan opini dari setiap topik-topik yang ditentukan Kompas. Sehingga dapat diketahui kecenderungan isi dari setiap pernyataan atau opini serta kesamaan atau perbedaan yang ada dari calon legislatif sebagai komunikator politik.

5. Kecenderungan Kegiatan Opini

Lingkup studi dalam penelitian ini terbatas pada studi komunikasi politik dalam arti luas, dimana yang akan diamati adalah terbatas pada pemberitaan dalam surat kabar Harian Umum Kompas semasa penyelenggaraan Pemilu Legislatif April 2009. Lebih khusus lagi studi disini membatasi diri pada liputan khusus Pemilu legislatif 2009 Harian Umum Kompas yang dituangkan pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif yang berkaitan dengan pandangan atau opini setiap tokoh calon legislatif para kontestan Pemilu legislatif terhadap topik-topik yang ditengahkan oleh pihak redaksi Kompas.

Kecenderungan ini bukan pengaturan sebelumnya untuk bertindak dengan cara tertentu dalam situasi baru dan kecenderungan juga tidak menentukan lebih dulu perilaku tetapi kecenderungan adalah kecenderungan dari suatu kegiatan yang mengungkapkan kepercayaan, nilai dan pengharapan personal. (Nimmo Dan, 1989:4)

Menurut Dan Nimmo (1993:12) yang dimaksud dengan opini atau pendapat adalah :

Tindakan yang mengungkapkan apa yang dipercaya, dinilai dan diharapkan seseorang dari objek-objek dan situasi tertentu.

Dari definisi yang diberikan Dan Nimmo menunjukkan bahwa opini merupakan kegiatan bisa berupa tindakan pemberian suara, pernyataan verbal, dokumen tertulis atau bahkan diam; singkatnya tindakan apapun bermakna adalah ungkapan opini, dengan kata lain seseorang yang mengungkapkan opininya

menunjukkan makna yang diberikan oleh orang itu kepada hal-hal yang bersangkutan.

Proses opini adalah hubungan atau kaitan antara (1) kepercayaan nilai, dan usul yang dikemukakan oleh perseorangan di depan umum dan (2) kebijakan yang dibuat oleh pejabat terpilih dalam mengatur perbuatan sosial dalam situasi konflik yakni dalam politik. Dalam proses itu, ada tiga tahap (Nimmo Dan, 1989:30)

- ❖ Aspek Personal yaitu tahap dimana individu mengamati segala sesuatu, menginterpretasikannya dan menyusun makna objek-objek politik secara sendiri-sendiri dan subyektif.
- ❖ Aspek Sosial yaitu tahap mengatakan opini pribadi di depan umum ada tiga bentuk pernyataan ini :
 - 1) Pemberian dan penerimaan opini pribadi di dalam kelompok sosial yang menghasilkan opini kelompok
 - 2) Jika orang mengungkapkan pandangannya bukan melalui kelompok terorganisasi melainkan melalui kebebasan pribadi yang relatif di dalam tempat pemberian suara, surat kepada anggota kongres, tanggapan terhadap opini pembuat, *poll*. Maka pilihan yang dibuat dalam keadaan tersendiri dan terpisah satu sama lain ini membentuk opini rakyat.
 - 3) Opini massa pada umumnya merupakan ungkapan pandangan yang baur dan tak terorganisasi, yang sering disimbolkan sebagai budaya, konsensus dan apa oleh politikus dengan fasih disebut opini publik.

- ❖ Aspek Politik yaitu tahap yang menghubungkan opini publik, opini rakyat dengan kegiatan para pejabat publik (eksekutif, legislatif dan hukum) yang sama-sama bertanggung jawab atas pemrakarsaan perumusan, penerimaan, penerapan, penginterpretasi dan penilaian kebijakan-kebijakan.

Untuk lebih menonjolkan aspek komunikasi politik pada studi ilmu politik khususnya dalam penelitian yang berhubungan dengan media massa khususnya surat kabar dan Pemilu legislatif, perlu banyak pendekatan yang bisa digunakan dalam studi ilmu komunikasi. Pendekatan itu menurut *Benard Barelson* (1971:18) bercirikan paling sedikit dua hal yaitu analisis terhadap pesan (*content analysis*) dan efektivitas komunikasi.

6. Analisis Isi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*content analysis*” atau analisis isi. Analisis isi menurut Jalaludin Rakhmat (1989:122) dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, peraturan, Undang-Undang, musik, teater, dsb.

Analisis isi terhadap isi atau pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi sangat penting untuk mengetahui apa saja yang disampaikan dan sampai sejauh mana pesan-pesan itu dengan mudah bisa dipahami oleh si penerima, dan kenapa pesan-pesan itu dianggap perlu oleh komunikator. Analisis isi juga berkaitan erat dengan efektivitas komunikasi, karena seperti halnya komunikasi, komunikasi politik juga bertujuan untuk menghasilkan efektivitas

yaitu diterimanya pesan-pesan komunikasi oleh komunikan dengan pemahaman yang lebih kurang sama dengan komunikator. (Rauf Maswadi, 1993:32)

Pengertian “*Content Analysis*” menurut Klause Krippendorff (1991:15) adalah

Content analysis is research technique for making replicable and valid inferences from data do their context.

(Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru/replicable dan sah data dengan memperhatikan konteksnya)

Pengertian analisis isi menurut Holsti dalam *Content Analysis An Introduction* (1981 :221) sebagai berikut

Content analysis is any tehniqye for making inference by objectively systematically identifying special characteristic of message.

(Analisis isi adalah teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik khusus dalam pesan secara obyektif dan sistematis)

Selanjutnya dijelaskan oleh Holsti, bahwa :

Content analysis measure the frequency with which aimbola or other unit appear in each category

(Analisis isi mengukur frekuensi dan simbol-simbol atau unit lain yang muncul dalam setiap kategori)

Hal tersebut menunjukkan bahwa analisis isi menggunakan metode kuantitatif dalam menghitung banyaknya frekuensi dari masing-masing kategori. Namun demikian Holsti mengemukakan juga pentingnya penggunaan metode kualitatif :

Qualitative content analysis the drawing inference on the basis of appearance or atribut in message. Thus the content analysis should use the qualitative and quantitative methodes to supplement each other.

(Analisis isi adalah menarik kesimpulan berdasarkan muncul atau tidaknya atribut dalam pesan. Jadi para peneliti analisa harus menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk saling melengkapi)

Jadi “*Content analysis*” adalah teknik penelitian yang ditujukan untuk mengetahui isi komunikasi, membuat inferensi dengan memperhatikan konteksnya serta mengidentifikasi ciri khusus dari pesan. Dalam menganalisa data digunakan metode kuantitatif untuk mengukur frekuensi serta metode kualitatif untuk menarik kesimpulan.

Di dalam membuat unit-unit analisis dan kategori-kategori yang dipakai, hampir tidak ada batasnya. Peneliti harus memutuskan sistem penghitungan apa yang akan di pakai untuk menghitung data, langkah ini dapat dilakukan dengan coding yaitu:

Proses dimana data mentah secara sistematis ditransformasikan dan dikumpulkan ke dalam unit-unit analisis yang memungkinkan pembuatan deskripsi karakteristik isi yang relevan. (Setiawan Bambang, 1989:18)

Analisis isi atau pernyataan atau pendapat yang dibuat oleh para elit politik atau tokoh-tokoh partai politik Indonesia pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif dalam liputan khusus Pemilu legislatif 2009 Harian Umum Kompas, merupakan kajian komunikasi politik yang didasarkan sepenuhnya atas metode penelitian yang dikembangkan oleh ilmuwan komunikasi. Dimana menghubungkan isu-isu politik yang berkembang di masyarakat dengan reaksi para elit politik. Maka akan terlihat suatu kecenderungan perkembangan isi

pernyataan atau pendapat tersebut, serta kesamaan ataupun perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan elite politik Indonesia atau tokoh-tokoh partai politik kontestan Pemilu legislatif 2009 terhadap tema-tema pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif dalam liputan khusus Pemilu.

F. Kerangka Pemikiran

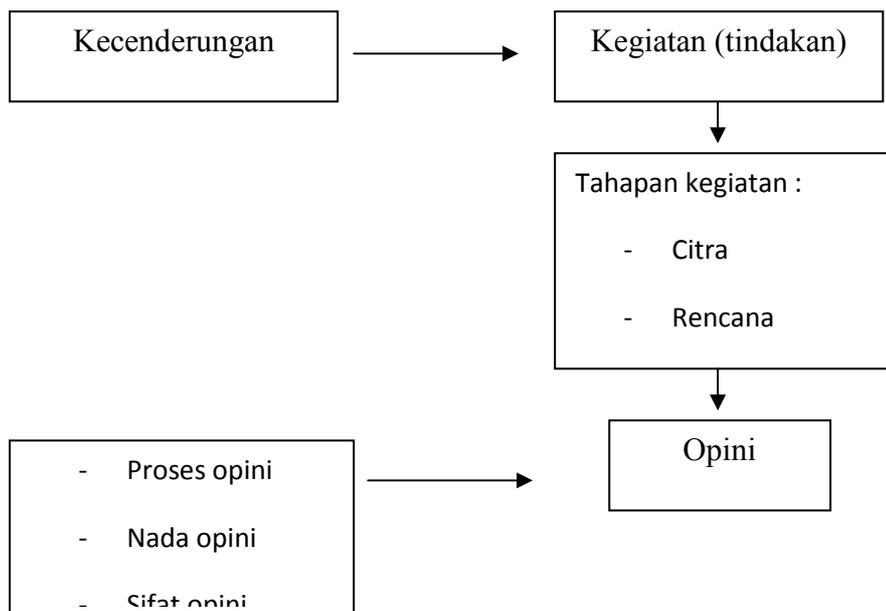
Kecenderungan tidak menentukan terlebih dahulu suatu perilaku tetapi kecenderungan adalah kecenderungan dari suatu kegiatan bukan untuk suatu kegiatan. Kecenderungan dari suatu kegiatan mengungkapkan kepercayaan, nilai dan pengharapan yang melalui tahapan-tahapan kegiatan yang terdiri dari citra, rencana dan operasi. Secara lebih sederhana, dari tiga tahapan kegiatan ini yang akan membentuk suatu opini.

Menurut Miller, Galanter dan Pribam citra adalah segala sesuatu yang telah dipelajari, diyakini seseorang yang relevan dengan situasi dan dengan tindakan yang bisa terjadi di dalamnya. Rencana merupakan proses interpretative seseorang dalam menilai objek tertentu sedangkan operasi merupakan harapan dari apa yang telah dilakukan seseorang. Opini terdiri dari tiga komponen yakni kepercayaan, nilai dan pengharapan. (Nimmo Dan, 1989:6-7)

Apabila ditinjau dari komunikasi politik, sebagai kegiatan opini menggabungkan citra dunia politik tertentu, rencana yang memperhitungkan objek politik tertentu dan operasi yang merupakan tanggapan penilaian yang bermakna yang memperhitungkan objek-objek membuat pilihan.

Jadi opini merupakan kegiatan yang mengungkapkan perasaan, nilai dan pengharapan yang disuarakan melalui perilaku dalam bentuk suatu pernyataan baik secara lisan maupun tulisan. Opini dalam penerbitan pers disebut sebagai artikel opini yang bersifat menjelaskan dan menerangkan secara terperinci terkait suatu peristiwa yang biasanya diangkat menjadi suatu tema oleh pihak media. Sehingga dari opini yang ada dapat muncul suatu nada pernyataan dan sifat opini dalam membahas suatu permasalahan.

Dari uraian di atas dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut



Gambar I.I Skema Kerangka Pemikiran

G. Definisi Konseptual

1. Kecenderungan

Kecenderungan merupakan kecenderungan dari suatu kegiatan dalam mengungkapkan kepercayaan, nilai dan pengharapan melalui suatu tahapan-tahapan kegiatan dalam pembentukan opini. Kecenderungan dalam penelitian ini merupakan jumlah yang paling banyak muncul dilihat dari frekuensi berdasarkan kategori yang telah ditentukan selama periode 3 Februari 2009 – 3 Maret 2009.

2. Kegiatan

Kegiatan adalah karakteristik intrinsik setiap organisme, termasuk manusia. Kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan kegiatan dalam pembentukan suatu opini meliputi :

a. Citra

Citra merupakan segala sesuatu yang dipelajari seseorang, yang relevan dengan situasi dan tindakan. Citra meliputi :

- 1) Kognisi yaitu pengetahuan seseorang baik benar ataupun keliru.
- 2) Preferensi (afeksi) yang melekat kepada tahap tertentu peristiwa menarik atau menolak tersebut dalam suatu situasi.
- 3) Konasi yaitu pengharapan yang dimiliki orang tentang apa yang mungkin terjadi jika ia berperilaku dengan cara yang berganti-ganti.

b. Rencana

Rencana merupakan proses interpretative seseorang dalam menilai objek tertentu. Rencana terdiri atas perintah yang diberikan seseorang kepada dirinya sendiri dengan melakukan kegiatan. Aspek utama rencana ialah

seseorang membawa perintah tidak hanya tentang apa yang harus dilakukan tetapi juga tentang akibat melakukan segala sesuatu. Melalui rencana seseorang membandingkan apa yang dimaksud dengan apa yang benar-benar tercapai.

c. Operasi adalah harapan dari apa yang telah dilakukan seseorang.

3. Opini

Menurut Dan Nimmo (1993:12) yang dimaksud dengan opini atau pendapat adalah suatu kegiatan yang mengungkapkan apa yang dipercaya, dinilai dan diharapkan seseorang dari objek-objek dan situasi tertentu. Definisi tersebut menunjukkan bahwa opini merupakan kegiatan yang berupa tindakan pemberian suara, pernyataan verbal, atau dokumen tertulis. Seseorang yang mengungkapkan opininya menunjukkan makna yang diberikan oleh seseorang kepada hal-hal yang bersangkutan.

Opini dalam penerbitan pers disebut sebagai artikel opini yang bersifat menjelaskan dan menerangkan secara terperinci terkait suatu peristiwa yang diangkat menjadi suatu tema oleh pihak media.

Penulis juga akan menjelaskan tiga kategori opini yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu

- a. Proses Opini
- b. Nada opini
- c. Sifat Opini

H. Definisi Operasional

Agar terjadi pengertian antara penulis dan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis akan menjelaskan konsep-konsep dalam bentuk operasional. Definisi operasional merupakan suatu definisi yang berdasarkan pada ciri-ciri (sifat, karakteristik) yang dapat diamati dari hal yang didefinisikan. (Ysh. Soegeng, 2006:38)

Kecenderungan opini dari calon legislatif pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif dilihat dari frekuensi setiap kategori-kategori yang telah ditentukan. Penulis menggunakan empat kategori yaitu tema, proses opini, nada pernyataan dan sifat opini. Keempat kategori tersebut dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Tema

Unit analisis tema adalah kalimat-kalimat sederhana yang muncul sebagai topik pembicaraan yang menghasilkan suatu opini dari masing-masing calon legislatif pada kolom komentar Spanduk Calon legislatif dalam liputan khusus Pemilu 2009 Harian Umum Kompas dengan kategori-kategori yang digunakan sebagai berikut :

1) Politik

Yang dimaksud dengan kategori politik adalah informasi yang menjelaskan tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, Presiden, Amademen UUD 1945, Kampanye Pemilu dan otonomi.

2) Ekonomi

Kategori ekonomi dalam analisis ini adalah informasi yang menjelaskan tentang sistem perekonomian, Korupsi, keuangan negara dan tentang Utang luar negeri.

3) Sosial

Yang dimaksud kategori sosial dalam analisis ini adalah informasi yang menjelaskan tentang agama, kemiskinan, pengangguran, peranan wanita.

4) Hukum

Yang dimaksud tentang kategori hukum dalam analisis ini adalah informasi yang menjelaskan tentang lembaga peradilan, peradilan, hakim dan kekerasan, HAM, kerisuhan.

2. Proses Opini

Unit analisis proses opini adalah hubungan antara kepercayaan, nilai dan pengharapan yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh calon legislatif terhadap tema-tema yang diangkat dalam setiap kolom Spanduk Calon Legislatif Harian Umum Kompas. Dengan menggunakan kategori-kategori :

1) Aspek Personal

calon legislatif mengamati segala sesuatu menginterpretasikannya dan menyusun makna obyek-obyek politik secara sendiri-sendiri dan subyektif dalam mengemukakan pernyataan atau pendapat terhadap tema-tema pada kolom Spanduk Calon Legislatif Harian Umum Kompas.

2) Aspek Sosial

Calon legislatif mengemukakan pernyataan atau pendapat pribadi di dalam kelompok sosial yang terorganisir terhadap tema-tema pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif dalam liputan khusus Pemilu 2009 Harian Umum Kompas yang menghasilkan opini bukan atas nama pribadi tetapi lebih kepada penggunaan kata-kata kita, kami.

3) Aspek Politik

Calon legislatif komunikator dalam kolom komentar Spanduk Calon Legislatif 2009 Harian Umum Kompas mengemukakan pendapat yang menghubungkan opini publik, opini rakyat dengan kegiatan pemerintah.

3. Nada Opini

Unit analisis Nada Opini adalah tindakan yang mengungkapkan apa yang dipercaya, dinilai dan diharapkan berdasarkan dari pernyataan atau pendapat serta sikap tokoh-tokoh calon legislatif yang berkaitan dengan tema-tema atau keijakan dari Pemerintah yang ditengahkan dalam Kolom Spanduk Calon Legislatif 2009 Harian Umum Kompas, kategorinya meliputi :

1) Favourable

Kecenderungan isi dari pernyataan atau pendapat dan sikap tokoh calon legislatif sebagai komunikator dalam kolom Spanduk Calon Legislatif mendukung atau setuju dengan kebijakan pemerintah yang selama ini berjalan serta mendukung berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah untuk perubahan-

perubahan yang berkaitan dengan masalah-masalah pada tema yang ditengahkan dalam kolom Spanduk Calon Legislatif Harian Umum Kompas.

2) Unfavourable

Kecenderungan isi dari pernyataan atau pendapat dan sikap tokoh calon legislatif sebagai komunikator dalam kolom komentar Spanduk Calon Legislatif tidak begitu mendukung kebijakan pemerintah selama ini serta tidak mendukung kebijakan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam topik yang ditengahkan pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif Harian Umum Kompas.

4. Sifat Opini

Unit analisis sifat opini adalah bentuk pernyataan atau pendapat dari setiap komunikator (tokoh partai) pada kolom Spanduk Calon Legislatif dalam liputan khusus Pemilu 2009 Harian Umum Kompas dengan kategori yang digunakan sebagai berikut :

1) Kritik

Bentuk dari pernyataan atau pendapat komunikator (tokoh calon legislatif) mengenai hal-hal yang tidak semestinya dan menunjukkan bagaimana seharusnya atau sebaiknya.

2) Saran

Bentuk dari pernyataan atau pendapat komunikator (tokoh calon legislatif) mengenai usulan, himbauan, atau cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan dalam pemecahan masalah.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian deskriptif, yang semata-mata ingin menerangkan atau mengungkapkan, menggambarkan keadaan atau gejala yang terdapat di dalam populasi.

Penelitian deskriptif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Disini deskriptif diartikan melukiskan variabel demi variabel satu demi satu. (Rakhmat Jalaludin, 1984:34)

2. Populasi dan Sampel

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1982:108) populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga. Maka populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah keseluruhan dari kolom komentar Spanduk Calon Legislatif dalam liputan khusus Pemilu 2009 Harian Umum Kompas sebanyak 25 buah kolom komentar dalam kurun waktu 3 Februari s/d 3 Maret 2009 sebanyak 29 hari dan efektifnya hanya 25 hari karena pada hari minggu merupakan edisi yang dominan hiburan saja. Oleh karena itu, kolom komentar Spanduk Calon Legislatif ditiadakan.

Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Jadi sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan sistem sensus.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan

menghimpun data dari sumber-sumber tertulis atau tercetak seperti buku, surat kabar, atau karya-karya ilmiah yang relevan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan diperoleh secara langsung dari naskah tulisan yang disajikan surat Kabar Harian Umum Kompas yang terdokumentasi dalam setiap edisi Kolom Spanduk Calon Legislatif. Kurun waktu 3 Februari s/d 3 Maret 2009

- b. Analisis isi, yaitu dilakukan dengan jalan mengamati secara langsung isi dari pernyataan atau opini dari masing-masing tokoh calon legislatif sebagai komunikator dalam kolom Spanduk Calon Legislatif.

4. Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis isi sebagai metode penelitiannya. Hal yang didasarkan pada fakta bahwa data yang tersedia berupa bahan-bahan yang terdokumentasi. (Setiawan Bambang, 1989:7)

Metode analisis isi dapat dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang aktual, maupun sudah berlaku ataupun keduanya. Dalam penelitian analisis isi pesan media, kunci untuk memahami isi komunikasi secara tepat apabila penelitian berdasarkan atas sifat-sifat sebagai berikut : (Slamet Yulius, 2006:122)

- a) Obyektif, bahwa kategori yang digunakan dalam analisis haruslah diberi batasan yang jelas dan tepat. Serta diartikan bahwa apabila kategori tersebut digunakan oranglain untuk melakukan analisis yang sama maka akan menghasilkan jawaban yang sama pula.

- b) Sistematis mempunyai arti bahwa para analis tidak dapat hanya memilih apa yang ada atau terdapat dalam isi pesannya saja untuk dilakukan pengujian akan tetapi akan memperhatikan apa yang relevan dengan isi pesan yang akan dianalisis.
- c) Kuantitatif mempunyai arti bahwa hasil dari analisis bisa dituangkan dalam bentuk angka-angka. Hal ini bisa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel kontigensi korelasi tergantung dari tujuan analisisnya. Dalam penelitian ini analisis dituangkan dalam bentuk distribusi frekuensi.
- d) Manifest bahwa suatu analisis dilakukan sesuai dengan apa yang tertulis atau tercetak dalam media yang bersangkutan.

Dari keterangan di atas, bahwa interpretasi yang diberikan terhadap pernyataan-pernyataan yang terbuka akan lebih mengarah kepada suatu batasan yang relatif memang sesuai dengan apa adanya dan bukan dalam arti yang mencakup pengertian yang luas.

Dengan demikian untuk keperluan analisis data terlebih dahulu dibuat *coding sheet*, yang dibuat untuk mengkarakteristik secara sistematis unit-unit analisis yang kemudian dilihat kemunculan kategori-kategori dalam tiap unit analisis yang ditentukan. Dari data mentah bersifat kuantitatif yang dihasilkan *coding sheet*, analisis selanjutnya untuk menarik kesimpulan yang menggunakan metode deskriptif atau kualitatif. Kedua pendekatan ini tidak dipisahkan akan tetapi saling melengkapi. (Setiawan Bambang, 1989:2)

5. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang digunakan disini dimaksudkan untuk mencari kesepadanan yang dicapai antara para peneliti dengan pengkode lain atas unit-unit analisis dan kategori yang dibuat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pengkode lain terhadap data yang sama, diharapkan kesepadanan, kehandalan atau reliabilitas sehingga bisa dibias dalam analisis data dapat diantisipasi.

Untuk melihat apakah data yang digunakan dalam analisis ini dapat memenuhi harapan suatu obyektivitas tertentu, Maka dalam penelitian ini yang dipakai adalah reliabilitas kategori. (Setiawan Bambang, 1989:35)

Rumus penghitungan Reliabilitas adalah sebagai berikut (Setiawan Bambang, 1989:37):

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Dimana: CR : Coefficient Reliability
M : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode
N1+N2 : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode

Karena tidak memperhitungkan tingkat persetujuan intercoder, maka digunakan rumus Scott sebagai berikut :

$$\pi = \frac{\text{persetujuan yang nyata} - \text{persetujuan yang diharapkan}}{1 - \text{persetujuan yang diharapkan}}$$

BAB II

DISKRIPSI SURAT KABAR KOMPAS dan KOLOM KOMENTAR “SPANDUK CALON LEGISLATIF”

A. Deskripsi Surat Kabar Kompas

Seluruh data dalam BAB II deskripsi surat kabar Kompas dan kolom komentar “Spanduk Calon Legislatif” adalah bersumber dari email kompas@kompas.com.

1. Riwayat Singkat Surat Kabar Kompas

Surat kabar Kompas terbit sejak 28 Juni 1965 di Jakarta. Kompas didirikan oleh P. K. Ojong dan Jacob Oetama dengan bantuan beberapa jurnalis pada waktu itu. Pada terbitan perdana, Kompas menyajikan empat halaman dengan berita utama “KTT Asia Afrika Ditunda Empat Bulan”.

Sedangkan oplah pertama Kompas tercatat 4800 eksemplar. Pada saat itu Kompas terbit lewat proses panjang, pada awal tahun 1965, lebih 30 koran anti komunis dituduh kurang revolusioner. Sebagai dampaknya koran-koran tersebut dilarang terbit. Dalam situasi demikian, koran pro komunis praktis tidak memiliki pesaing. Kenyataan ini segera saja memunculkan ketimpangan penerbitan. Sementara pada saat bersamaan, massa komunis juga semakin meningkatkan tekanannya. Mereka semakin garang dalam melancarkan taktik “desa mengepung kota” dengan melaksanakan aksi penyerobotan tanah. Dalam kondisi demikian, Kompas lahir ketika pengaruh komunis sedang demikian kuatnya dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Pada saat itu partai politik

diakui sebagai satu-satunya organisasi sosial yang boleh menyalurkan aspirasi politik masyarakat. Karenanya setiap surat kabar harus mengaitkan dirinya dengan salah satu partai politik yang ada. Kompas memilih Partai Katolik yang dipimpin oleh I.J. Kasimo untuk mengikatkan diri. Setelah peraturan ini ditiadakan, Kompas melepaskan diri dari Partai Katolik dan menjadi surat kabar yang independen. Pada mulanya koran yang akan diterbitkan itu diberi nama Bentara Rakjat yang arti harfiahnya “pengawal rakyat” dilandasi harapan bahwa koran ini bisa tampil sebagai pengawal kepentingan rakyat banyak. Namun, atas usul Presiden Soekarno kepada Menteri Perkebunan Drs. Frans Seda, dengan kesepakatan bersama nama itu diganti dengan Kompas supaya lebih jelas artinya dan diterima sebagai petunjuk arah. Nama Bentara Rakjat tidak dibuang tetapi digunakan sebagai nama yayasan tempat koran tersebut bernaung.

Kelahiran Kompas memberikan reaksi pertentangan dan ejekan dari media massa pro komunis. Mereka menuduh Kompas sebagai corong umat Katolik massa, dengan mengartikan Kompas sebagai kependekan dari kata “Komando Pastur”. Tuduhan itu tentunya sama sekali tidak memiliki dasar kuat. Memang benar bahwa Kompas berdiri dengan mayoritas orang-orang yang beragama Katolik sebagai pengasuhnya, serta bernaung di bawah Yayasan Bentara Rakjat yang notabene dimiliki orang-orang Katolik. Namun demikian sesuai dengan tujuan pendiriannya sejak semula, keberadaan Kompas tidak lain adalah untuk menyelamatkan rakyat dari penyimpangan opini dan hasutan-hasutan massa komunis serta tegaknya orde baru. Kompas pertama terbit empat halaman, dengan halaman pertama pojok kiri atas tertulis nama-nama pengurus redaksi Kompas

saat itu. Tertulis pemimpin redaksi oleh Drs. Jacob Oetama, sedangkan staf redaksi antara lain J. Adisubrata, Lie Hwat Nio, S.H, Marcel Beding, Th. Susilastuti, Tan Soei Sing, J. Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Th. Ponis Purba, Tinon Prabawa dan Eduard Liem.

Melihat penampilan wajah surat kabar Kompas terbitan pertama, disangsikan Kompas akan berumur panjang. Tatanan wajahnya tidak beraturan, gambarnya kurang terang dan sama sekali belum memiliki tambahan aksesoris untuk mempercantik diri. Tetapi di balik segala keterbatasan serta kekurangan itu, para pengelolanya justru terpacu untuk terus menerus memperbaiki penulisan dan penyajian koran terbitan mereka. Berbekal keyakinan, kegigihan dan semangat pantang menyerah untuk membuka peluang merebut pasar, nantinya terbukti dapat mendorong harian Kompas tetap lestari hingga hari ini. Edisi perdana Kompas dicetak sejumlah 4.800 eksemplar.

Seiring dengan perbaikan mutu pemberitaan dengan meningkatkan kualitas cetak serta memperlancar arus distribusinya hanya dalam waktu sebulan Kompas dicetak di PN Eka Grafika, kemudian dialihkan percetakannya di Percetakan massa Merdeka di jalan A.M Sangadji. Terbukti dari angka 4.800 eksemplar, begitu mutu percetakannya membaik Kompas langsung meningkatkan oplah hampir dua kali lipat, tirasnya menjadi 8.000 eksemplar. Namun hanya sekitar tiga bulan Kompas lahir, datang musibah. Tanggal 30 September 1965 tengah malam, gerombolan G30S PKI melancarkan aksinya. Enam Jenderal pucuk pimpinan TNI AD disergap dan dibunuh. Salah seorang korbannya Panglima Angkatan Darat Achmad Yani, tokoh yang ikut menjadi penganjur

lahirnya Kompas. Keguncangan politik karena G30S PKI mengakibatkan Kompas dan beberapa surat kabar lainnya ditutup, tepatnya mulai 1 Oktober 1965. Pelaksanaan Penguasa Perang Daerah (Papelrada) mengumumkan hanya dua koran dan dua kantor berita diijinkan terbit yaitu koran Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha serta LKBN Antara dan Pemberitaan Angkatan Bersenjata (PAB).

Lima hari kemudian Kompas diijinkan terbit kembali, namun Kompas baru terbit kembali pada tanggal 6 Oktober 1965. Pada saat itu, dengan adanya lowongan dari Papelrada, Kompas segera pindah cetak ke PT. Kinta, salah satu percetakan terbaik di Jakarta pada masa itu. Setelah perpindahan Kompas ke percetakan baru, bukan saja wajahnya semakin cantik bahkan tirasnya pun semakin meningkat menjadi 50.000 eksemplar.

Tentu saja peningkatan oplah tidak hanya disebabkan makin baiknya mutu percetakan melainkan dipengaruhi pula oleh permintaan masyarakat yang ingin tahu situasi kota Jakarta dimana setelah semua percetakan ditutup, otomatis mereka tidak mengetahui tentang perkembangan situasi kota Jakarta. Kompas menyadari selama sebuah koran belum mampu memiliki percetakan sendiri, berbagai macam kendala tetap menghalangi kemajuannya. Sehingga impian atas sebuah percetakan milik sendiri selalu menjadi obsesi mereka. Impian itu baru terwujud pada pertengahan tahun 1972 dengan lahirnya percetakan Gramedia. Secara berangsur-angsur dengan adanya percetakan milik sendiri, seluruh kegiatan redaksional Kompas mulai bisa disatukan di kompleks Palmerah Jakarta Pusat. Sekalipun kegiatan administrasinya masih berada di gedung Perintis Jakarta Barat. Pada tahun 1972, oplah Kompas berhasil menembus angka 100.000

eksemplar. Selanjutnya juga memasuki tahun 1975 oplah Kompas terus meningkat hingga 200.000 eksemplar dan sampai tahun 1986 oplah Kompas menembus 500.000 eksemplar yang bertahan hingga sekarang dengan daerah penyebaran secara nasional. Distribusi Kompas meliputi seluruh Nusantara. Terbanyak berada di Jabotabek, disusul wilayah Sumatera dan wilayah-wilayah lainnya. Kompas telah pula mengembangkan sistem jarak jauh yang memungkinkan pembaca di daerah dapat menikmati Kompas sedini mungkin seperti pembaca di Jakarta. Sebelumnya, distribusi Kompas dilakukan dengan perjalanan darat untuk daerah Jawa, sedangkan daerah lain diangkut dengan jasa angkutan kargo. Tak ketinggalan Kompas beredar pula di luar negeri antara lain di Singapura, Hongkong dan Pantai Barat. Peningkatan oplah ini mengindikasikan bahwa Kompas semakin dipercaya oleh masyarakat Indonesia.

Kepercayaan rakyat tak lepas dari kritisan Kompas mengupas berita-berita sosial. Kekritisan Kompas ini tidak hanya membuahkan kesuksesan oplah, tetapi sempat pula diselingi dengan pembredelan oleh pemerintah. Larangan terbit ini muncul pada tahun 1978 karena pemberitaan tentang maraknya demonstrasi mahasiswa yang dinilai tidak proposional dan tidak bertanggungjawab. Setelah diperbolehkan terbit kembali sekitar tiga minggu kemudian. Kompas mulai terbit tujuh kali seminggu dengan edisi Minggu yang sebelumnya belum ada. Kompas sempat mengalami pelarangan selama dua minggu pada pertengahan tahun 1978 bersama lima koran ibukota lainnya sebagai sanksi akibat melanggar rambu-rambu pemerintah. Dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Pers tahun 1982 dan diberlakukannya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), semua ikut

mendewasakan Kompas. Sesuai ketentuan, penerbitannya segera dialihkan dari Yayasan Bentara Rakyat ke PT. Kompas Media Nusantara, dengan nomor SIUPP: SK Menpen No.031/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 tanggal 21 Januari 1969. Sesuai ketentuan, penerbitannya segera dialihkan dari Yayasan Bentara Rakyat ke PT. Kompas Media Nusantara.

2. Perkembangan Kompas

Kompas mengalami perkembangan yang pesat dan merupakan satu-satunya Koran di Indonesia yang menjadi anggota Audit Bureau of Circulation (ABC), Sidney Australia. Suatu badan Internasional yang dibentuk bersama oleh para penerbit, pemasang iklan dan biro-biro iklan. Fungsi badan ini adalah mencatat dan menyiarkan angka-angka sirkulasi yang benar dari para anggotanya. Angka-angka pada grafik yang dibuat memberikan kesimpulan bahwa Kompas tersebar luas di seluruh pelosok Indonesia dan menjadi panutan untuk mendapatkan informasi bagi berbagai macam lapisan masyarakat dengan aneka ragam keperluan mereka.

Oplah Kompas semakin hari semakin berkembang pesat. Hal tersebut karena semakin baiknya mutu percetakan yang dimiliki oleh Kompas. Pada edisi perdana Kompas hanya menerbitkan 4.800 eksemplar dan pada tahun 1990 kuartal pertama oplah Kompas sudah mencapai 526.611 eksemplar per hari. Penyebaran meliputi seluruh pelosok Indonesia secara rata-rata, per daerah, per sirkulasi Kompas kuartal pertama 1990 menurut ABC, sebagian besar oplahnya di daerah Jakarta dan sekitarnya yaitu 249.004 eksemplar, disusul Jawa Barat

sebanyak 61.272 eksemplar, Jawa tengah 48.585 eksemplar, Sumatera 64.851 eksemplar, Kalimantan 17.910 eksemplar, Indonesia Timur 36.880 eksemplar dan eceran di luar Jakarta sebanyak 31.591 eksemplar. Perkembangan oplah Kompas sesuai dengan data *Survey Research* Indonesia (SRI) untuk tahun 1994 mencapai 2.049.000. Sementara menurut ABC pada tahun 1995, Kompas dibaca sekitar 3.000.000 lebih penduduk Indonesia di tujuh kota besar. Sedangkan data SRI pada tahun 1995 yang dikumpulkan dari Sembilan kota besar di Indonesia menunjukkan 14,3% masyarakat di kota tersebut membaca Kompas.

Peredaran Kompas telah mencapai seluruh pelosok nusantara, setidaknya tidaknya disemua Kabupaten di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk di dunia, untuk sementara Kompas sudah memiliki perwakilan agen di Singapura, Hongkong dan Pantai Barat Amerika Serikat. Tetapi untuk langganan perorangan, boleh dikatakan Kompas telah tersebar di lima Benua. Kompas tetap mengikuti perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju yaitu dengan membuat Kompas online, sehingga pembaca Kompas semakin bertambah dan beragam. Berita dalam Kompas online setiap saat dapat di-*update*, sehingga berita yang disajikan di alamat www.kompas.com benar-benar hangat dan aktual.

3. Visi, Misi dan Kebijakan Redaksional Kompas

a. Visi Kompas

Visi adalah pandangan media yang bersangkutan tentang permasalahan masyarakat, visi sekaligus menjadi kerangka acuan surat kabar yang bersangkutan. Maka bila ada suatu kejadian yang sama, tatkala dilaporkan sebagai

berita oleh berbagai Koran, dapat berbeda-beda kelengkapan isi, susunan, semangat dan bentuknya. Perbedaan tersebut disebabkan adanya bermacam-macam daya tangkap, perbedaan tafsir dan selera tentang apa yang dipandang sebagai suatu hal yang penting atau pokok dalam kejadian tersebut. (Djuroto Totok, 2000:25)

Visi atau pandangan pokok itu sekaligus diperkaya dan diaktualisasikan oleh para wartawan melalui pekerjaan dan karyanya, melalui pergualatan dengan realitas serta pemikiran yang mereka olah menjadi bahan berita, laporan maupun komentar. Manusia dan kemanusiaan, serta cobaan dan permasalahannya, aspirasi dan hasratnya, keagungan dan kehinaannya adalah faktor yang ingin ditempatkan secara sentral dalam visi Kompas. Karena itu manusia dan kemanusiaan senantiasa diusahakan menjadi nafas pemberitaan dan komentarnya. Tergerak oleh visi tersebut, Kompas berusaha senantiasa makin peka akan nasib manusia dan semestinya berpegang pula pada ungkapan klasik dalam jurnalistik : menghibur para papa, mengingatkan yang mapan. Apabila seseorang bicara tentang manusia dan kemanusiaan dalam konteks kebudayaan, sering konotasi yang timbul adalah kepada humanisme sekular dalam sejarah perkembangan Eropa. Konotasi itu membuat orang cemas bahkan curiga. Tetapi, jika misalnya diingatkan kepada Pancasila yang berpegang pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta kemanusiaan yang bertakwa dan berdimensi religiolitas, maka hal itu pula yang justru menjadi visi dan semangat surat kabar Kompas.

Maka visi Kompas adalah komitmen untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia baru yaitu masyarakat dengan kemanusiaan yang

transedental, persatuan dalam perbedaan, menghormati individu dan masyarakat yang adil dan makmur.

b. Misi Kompas

Kompas bukan sekedar Koran, itulah kesan yang pasti ada ketika seseorang menyimak Kompas. Kompas memiliki liputan luas, dan bahkan lebih luas bahkan berita di Kompas memiliki integritas. Berita bukan lagi sekedar informasi, namun sebuah dialog dengan pembaca dan informasi itu sendiri padat, berisi, diulas luas, menghormati hati nurani, penuh wawasan dan membuat cerdas.

c. Kebijakan Redaksional Kompas

Kebijakan redaksional menjadi pedoman dan ukuran dalam menentukan kejadian apa yang patut diangkat serta dipilih untuk menjadi bahan berita maupun bahan komentar. Kebijakan redaksi sendiri merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan visi dan misi surat kabar yang bersangkutan. Visi pokok yang dijabarkan menjadi kebijakan redaksional. Selain menjadi kerangka acuan serta kriteria dalam menyeleksi dan mengolahnya menjadi berita, juga menjadi visi serta seuntai nilai dasar yang dihayati bersama oleh para wartawan yang bekerja dalam penerbitan tersebut.

Kepekaan Kompas akan hal-hal kemanusiaan tertuang pada motto “Amanat Hati Nurani Rakyat” yang selalu dituliskan di bawah logo Kompas. Selain itu, Kompas juga memiliki slogan “Buka Mata dengan Kompas”. Slogan tersebut merupakan ajakan kepada masyarakat untuk dapat lebih peka terhadap kondisi sosial. Dalam pelaksanaan sehari-hari, kebijakan redaksional tersebut dijabarkan dalam menyeimbangkan diantara pendekatan-pendekatan dalam

menyiarkan berita. Kompas sering menjadi kekuatan kontrol dalam masyarakat yang tidak memihak pada suatu golongan terutama dalam menangani kasus-kasus pemberitaan. Satu ungkapan jurnalistik yang sering digunakan Kompas dalam pemberitaannya adalah “liput dua belah pihak, dengarkan pihak lain, jangan-jangan masih ada kemungkinan lain”. Kompas didalam kebijakan redaksionalnya dituntut oleh butir-butir kebijakan utama Kompas sebagai berikut :

- i. Kompas bukan semata-mata berpihak kepada suatu golongan, partai maupun agama.
- ii. Kompas tidak membenarkan mengkritik seseorang secara pribadi misal kepada para pejabat.
- iii. Tidak membenarkan wartawan mencari keuntungan pribadi.
- iv. Menggunakan sistem cek dan richek dlaam proses mencari berita.
- v. Menghargai off the record.
- vi. Menghargai hak jawab baik dlaam bentuk berta maupun surat pemberitaan.
- vii. Tidak memuat berita yang berbau sarah.
- viii. Pemberitaan dalam lingkup asional, tidak ada kebijakan presentase setiap daerah.
- ix. Tidak ada presentase volume/isi yang akan dimuat baik politik, ekonomi dan lain-lain dengan kata lain mana yang aktual dan dirasa penting akan dimuat.

Didalam memuat suatu berita, semua masalah masuk melalui suatu proses agar dapat dimuat. Sedangkan khusus rubrik opini merupakan tulisan para

intelektual yang diseleksi langsung ditangani oleh pemimpin redaksi dan ada sedikit mengalami perubahan, mengingat sifatnya adalah pendapat. Sedangkan untuk tulisan lain ditangani dan dikoreksi oleh desk redaksi masing-masing. Pola peliputan sewaktu-waktu berubah ketika ada suatu event yang memang membuat redaksi memandang perlu menyajikan secara khusus dengan porsi besar atau pemasangan iklan satu halaman penuh. Adapun Tahapan kerja redaksi meliputi :

- a) Persiapan
- b) Perencanaan
- c) Penugasan
- d) Peliputan
- e) Pematangan
- f) Penulisan
- g) Penyuntingan
- h) Pemuatan
- i) Pencetakan

4. Susunan Organisasi Pemberitaan

Apabila disbanding dengan kebanyakan surat kabar lain di Indonesia Kompas boleh dikata merupakan surat kabar yang paling matang dalam hal manajemen organisasi dan redaksinya. Ini bisa dimaklumi melihat usianya yang sudah mencapai 44 tahun, Kompas sudah cukup banyak mengecap asam garamnya mengelola usaha persurat kabaran di tanah air. Kenyataan ini dapat dilihat dari pola struktur organisasinya yang sudah relatif mapan tanpa adanya

perubahan-perubahan yang berarti, kecuali hanya dengan melakukan penambahan atau pengembangan beberapa bagian (sub unit) agar berfungsi lebih optimal. Berikut ini adalah nama-nama para pemegang jabatan dalam redaksi dan perusahaan Kompas :

Pendiri : P.K. Ojong (1920-1980), Jacob Oetama

Pemimpin Umum : Jacob Oetama

Wakil Pemimpin Umum : ST. Sularto, Agung Adiprasetyo

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suryopratomo

sWakil Pemimpin Redaksi : Bambang Sukartiono, Rikard Bagun

Redaktur Senior : August Parengkuan, Ninok Leksono

Redaktur Pelaksana : Trias Kuncahyono

Wakil Redaktur Pelaksana : Taufik H. Miharja

Sekretaris Redkasi dan Wakil : Retno Bintarti

Wakil Sekretaris Redaksi : Mamak Sutamat, Oemar Samsuri

Kepala Litbang : Daniel Dhakidae

Staf Litbang : Bestian Nainggolan, Terini Iriani, Shinta

Ratnawati, F. Harianto, Santoso, Krishna P.

Panolih, Bambang Setiawan, Anung Wendayartaka

Pemimpin Perusahaan : Lukas Widjaja

Manajer Iklan : Lukas Widjaja

Manajer Sirkulasi : Sugeng Hari Santoso

Sedangkan alamat Kompas

Kantor Redaksi : Jl. Palmerah Selatan 26-28 Jakarta 10270

Telp.5347710/20/30, 5302200 Fax 5486085

Alamat Surat (seluruh bagian): P.O. BOX 4612 Jakarta 12046

Alamat Kawat : KOMPAS JAKARTA

Bagian Iklan : Jl. Gajah Mada 109-110 A Jakarta 11140

Bagian Sirkulasi (langganan): Jl. Gajah Mada 104 Jakarta 11140

Online : [HTTP//WWW.KOMPAS.COM](http://WWW.KOMPAS.COM) E-Mail : KOMPAS@KOMPAS.COM

B. Diskripsi Kolom Komentar Spanduk Calon Legislatif

Surat kabar atau pers berfungsi sebagai media penyalur pikiran dan perasaan masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk fakta maupun opini. Dimana isi media cetak pada umumnya berupa informasi, gagasan, pendapat dan saran. Bahkan juga perasaan khalayak seperti kekecewaan, kesedihan, kebingungan, harapan, keinginan bahkan kemarahan. Semua itu meliputi bidang kehidupan masyarakat yang sewajarnya dan akan ditanggapi oleh siapapun yang berkepentingan.

Seperti yang diungkapkan Lazardfeld, Benard Barelson dan Hazel Gandet bahwa betapa besar peranan surat kabar dalam pembentukan sikap pembaca dari setiap berita atau informasi. Pembaca akan menanggapi atau membaca suatu permasalahan yang dimuat surat kabar dalam membentuk pendapat atau opini didalam cara mereka memberikan suara. (Don Michael Flournoy, 1989:104)

Terlihat dalam peranan surat kabar Kompas sebagai medium komunikasi politik dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu khususnya Pemilu legislatif.

Surat kabar Kompas menyajikan suatu kolom komentar yang berupa opini dari calon legislatif sehingga pembaca dapat menanggapi dan membentuk opini didalam cara mereka memberikan suara.

Kolom komentar Spanduk Calon Legislatif disajikan selama satu bulan sebelum Pemilu legislatif diselenggarakan dan merupakan liputan khusus Pemilu surat kabar Harian Umum Kompas selama 29 Hari. Adapun fungsi pers dalam hal media cetak mengangkat realita sosial yang terjadi di tengah masyarakat dan mensosialisasikan calon-calon legislatif pada masyarakat. Selain itu, dari komentar yang berupa opini dari calon legislatif merupakan salah satu informasi mengenai visi dan misi calon legislatif untuk diketahui oleh masyarakat.

Komentator memberikan opini atau pernyataan berdasarkan tema-tema yang sudah dipilih atau ditentukan oleh pihak media (Kompas) berkaitan dengan masalah-masalah yang masih hangat diseputar Pemilu legislatif 2009 dan terkait isu-isu pemerintah. Baik menyangkut permasalahan dibidang politik, ekonomi, sosial, hukum bahkan pertahanan dan keamanan.

Kolom komentar Spanduk Calon Legislatif mulai disajikan oleh Harian Umum Kompas pada tanggal 3 Februari 2009. Setiap tema yang diketengahkan oleh Redaksi Kompas selalu diikuti oleh calon legislatif sebagai komentator dari perwakilan masing-masing partai politik. Selama 29 hari yaitu mulai tanggal 3 Februari s/d 3 Maret 2009 dan dikurangi hari Minggu yang berlangsung sebanyak 4 kali yaitu tanggal 8, 15, 22 Februari dan 1 Maret 2009. Disebabkan pada hari Minggu surat kabar Kompas tidak menyajikan kolom komentar Spanduk Calon legislatif, karena merupakan edisi khusus hiburan saja.

Jadi Kolom komentar Spanduk Calon Legislatif hanya disajikan 25 hari yang diikuti oleh calon legislatif 2009 dengan membahas tema-tema yang ditentukan oleh pihak media Harian Umum Kompas dengan jumlah komentator yang tidak tetap.

Pada edisi pertama kolom komentar Spanduk Calon Legislatif yaitu pada tanggal 3 Februari 2009, terdapat delapan komentar yang membahas topik kebijakan afirmatif pada perempuan. Komentator yang ikut serta cenderung calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terdiri dari Kana Kadianto dari PDIP caleg DPD, Syafri Fadillah Marpaung dari Partai Indonesia Sejahtera caleg DPR, Ferry Mursyidan Baldan dari Golkar untuk caleg DPR RI, Farid Mashjudi dari PAN untuk caleg DPRD, Hasir Sonda dari Partai pelopor untuk caleg DPR. Calon legislatif memberi komentar dari topik yang diangkat pihak media Kompas mengenai kebijakan afirmatif bagi perempuan sebagai hasil kebijakan dari Mahkamah Konstitusi agar pembagian kursi untuk perempuan berdasarkan suara terbanyak.

Pada edisi kedua topik yang diangkat masih mengenai kebijakan afirmatif bagi perempuan yang diikuti oleh tujuh komentator dan komentator banyak berasal dari calon legislatif untuk DPR RI dengan latar belakang partai yang berbeda-beda. Yakni Dhaniswara Harjono dari partai Peduli Bangsa untuk caleg DPD, Lendry Suseno dari partai Damai Sejahtera untuk caleg DPRD, komentator ketiga yaitu Bambang Praswanto dari PDIP mencalonkan diri untuk caleg DPR RI, selanjutnya komentator Piu Lustrilanang dari Gerindra untuk caleg DPR RI, Hendry Munthe berasal dari partai Serikat Indonesia untuk caleg DPR RI,

komentator Gonda Prihastono dari partai PAN untuk caleg DPR RI dan yang terakhir dari Roedhi Alex Haryanto dari PDIP untuk caleg DPRD.

Pada edisi ketiga, pada tanggal 5 Februari 2009 dengan topik yang diangkat oleh pihak media mengenai bagaimana mengangkat nasib buruh. Komentator berpartisipasi sebanyak enam komentator yang cenderung mencalonkan diri untuk caleg DPRD. Komentator tersebut yakni Fidelis Giawa caleg untuk DPR RI dari partai Gerindra, Rosmini Simbela dari partai Bintang Reformasi yang mencalonkan diri sebagai caleg DPRD, Harjoko Sangganagara dari PDIP sebagai caleg DPR RI, Saudi yang mencalonkan diri untuk caleg DPRD untuk PAN, Puji Raharjo dari partai Golkar yang mencalonkan untuk DPRD dan yang terakhir komentator dari Sarma Marihotoa untuk caleg DPRD dari partai Hanura.

Pada tanggal 6 Februari 2009 merupakan edisi kelima kolom komentar Spanduk Calon Legislatif. Diikuti oleh delapan komentator yang berasal dari partai yang berbeda-beda dan cenderung mereka mencalonkan untuk caleg DPR RI. Adapun komentator tersebut yaitu Riza Palepi calon untuk anggota DPD, Junaidi Ali untuk caleg DPR, Raiders Salmon Marpaung untuk caleg DPRD dari Partai Damai Sejahtera, Hasir Sonda untuk caleg DPR dari Partai Pelopor, Faizal Abidin dari partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang mencalonkan diri untuk anggota DPRD, Syafri Fadillah Marpaung dari Partai Indonesia Sejahtera yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, Effendy Naibaho dari PDIP, untuk caleg DPR RI, yang terakhir Martin L. Peranginangin untuk caleg DPRD dari Partai Damai Sejahtera.

Edisi keenam pada tanggal 7 Februari 2009 yang diikuti oleh delapan komentator yang berasal dari partai yang berbeda-beda yaitu Kiki Rizki dari PKB yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, Rahyanto Dwi untuk caleg DPRD dari PKB, Zarkasi dari partai Golkar untuk caleg DPRD, Wisnu Widjadja dari partai Perjuangan Indonesia Baru yang mencalonkan diri untuk DPRD, Bambang Paraswanto dari PDIP untuk caleg DPR, Satibi Darwis dari PAN yang mencalonkan diri sebagai DPR, Henry Munthe untuk caleg DPR dari Partai Serikat Indonesia dan terakhir Thamrin Edy dari Partai Demokrasi Kebangsaan untuk caleg DPR.

Tanggal 9 Februari 2009 merupakan edisi ketujuh kolom komentar Spanduk Calon Legilastif dengan topik yang diangkat pihak media mengenai kinerja DPR yang akan datang apakah lebih baik atau tidak. Komentator yang ikut serta berjumlah Sembilan komentator yakni Ridwan dari P3 untuk caleg DPRD, Jonni S Batubara dari Partai Damai Sejahtera untuk caleg DPRD, Bonny Oldam Romas dari partai Merdeka untuk caleg DPD, Wisnu Widjadja dari Partai Indonesia Baru untuk caleg DPR, Pieter Paat untuk caleg DPR dari Partai Damai Sejahtera, Yusnawiyandi untuk caleg DPRD, Ziurahman sebagai caleg DPR dari Golkar, Syafri Fadillah Marpaung dari Partai Indonesia Sejahtera untuk caleg DPR dan komentar terakhir dari Sasly Thamrin dari Partai DPRD sebagai caleg DPRD.

Pada Tanggal 10 Februari 2009 komentator masih membahas topik mengenai kinerja DPR yang akan datang. Komentator diikuti oleh delapan komentator yang cenderung mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Adapun

komentator tersebut yakni Edi Suryo dari Partai Republika untuk caleg DPRD, Andi Najmi untuk caleg DPR dari Partai PKNU, Iwan Setiyoko yang mencalonkan diri untuk anggota DPRD dari PKS, Estu dari Partai Demokrat, Parasian Simoblon dari Partai Barisan Nasional yang mencalonkan diri untuk anggota DPR, Tulus Purba dari Partai Buruh yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, Afendi seorang caleg untuk DPRD dari Gerindra dan komentar terakhir dari Robert Pangabean dari Partai Hanura untuk calon anggota DPRD.

Pada tanggal 11 Februari 2009 terdapat sebelas komentar dari komentator yang cenderung mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dan berasal dari partai yang berbeda-beda yakni Herjendi dari Partai Indonesia Sejahtera yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, Puji Raharjo untuk anggota DPRD dari Partai Golkar, Jemmy Frans dari Partai Demokrat untuk caleg DPR, Joni dari Golkar yang mencalonkan diri untuk anggota DPRD, Hafizman dari Partai Indonesia Sejahtera untuk caleg DPRD, Basuki Ismael dari PAN yang mencalonkan diri sebagai DPRD, Charles Robby yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, Joel Simanjutak dari PNBKI yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, Yogar Bachtiar dari Partai Kedaulatan untuk caleg DPR, Neni Anggraeni dari PNBK seorang calon anggota DPRD dan Haryanto dari Partai Keadilan Sejahtera untuk caleg DPR.

Pada tanggal 12 Februari 2009 merupakan edisi kesepuluh kolom komentar Spanduk Calon Legislatif yang membahas topik mengenai pendidikan yang sulit dijangkau rakyat miskin. Komentator cenderung mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Komentator tersebut terdiri dari Susy Rohati dari Partai

Demokrat untuk caleg DPRD, Yulian Wahyudi dari Partai Demokrasi Pembaruan untuk caleg DPR, Rio SM dari PDIP yang mencalonkan diri sebagai caleg DPR, Untung Wahyono yang mencalonkan diri untuk anggota DPR RI dari PKS, Faizal Abidin dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia sebagai caleg DPRD, Darwis Batubara sebagai calon anggota DPRD, Paimin Ambarita dari Partai Serikat Indonesia untuk caleg DPRD.

Edisi kesebelas, pada tanggal 13 Februari 2009 masih membahas mengenai topik pendidikan yang masih dijangkau rakyat miskin yang diikuti oleh lima komentator yang terdiri dari Rusmin seorang calon anggota DPRD dari PKS, Quraisy Syadzily dari PKB yang mencalonkan sebagai anggota DPR, Diki Zulkarnain dari Partai Hanura sebagai calon anggota DPRD, Aunurafik sebagai calon anggota DPRD yang berasal dari PBB, Eddy SR dari PMB seorang calon anggota DPRD.

Pada tanggal 14 Februari 2009 merupakan edisi kedua belas yang diikuti oleh enam komentator yakni Suprayitno Irawan dari Partai Hanura seorang yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, Muzakir sebagai caleg DPR dari PKS, Parasian Simbolon dari PBN sebagai caleg DPR, M. Kristianti dari Partai Persatuan Daerah calon anggota DPRD, Nikson Nababan dari PNBK Indonesia sebagai calon anggota DPRD, Anwar Muzamil dari Partai Demokrat seorang caleg DPRD.

Pada tanggal 16 Februari 2009 merupakan edisi ke-13, pihak media mengangkat topik mengenai kinerja DPR dalam menyelesaikan kasus HAM selama ini. Komentator yang ikut serta berjumlah enam, dimana banyak berasal

dari PDIP dan cenderung komentator yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Yakni Fathorahman Muzay dari Partai Bintang Reformasi dan calon anggota DPR, Iwan Dwi dari PKB seorang caleg DPR, Firman Jaya Deli dari PDIP untuk caleg DPR, Maruarar Sirait caleg DPR dari PDIP, Jonni Tambunan seorang caleg DPR dari Partai Demokrat dan Wisnu Widjaja dari PDIP untuk caleg DPRD.

Pada edisi ke-14, tanggal 17 Februari 2009 pihak media masih mengangkat topik mengenai kinerja DPR dalam menuntaskan kasus HAM. Jumlah komentator yang ikut masih sama seperti pada edisi ke-13 yaitu enam komentar. Dimana komentator tersebut diikuti oleh Ahsan Wahid dari Partai Karya Perjuangan seorang caleg untuk DPRD, Suhiya Lubis dari PMB untuk caleg DPRD, Rikson Sibuea untuk caleg DPR dari Partai Kesatuan Daerah, Jefri R. Paat dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk caleg DPR, Saryono Jahidi dari Partai Kebangkitan bangsa untuk caleg DPR, Charles Robbi dari Partai Demokrasi Pembaruan untuk caleg DPR. Pada Edisi ini, komentator cenderung merupakan caleg yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan dari masing-masing partai.

Edisi tanggal 18 Februari 2009 diikuti oleh komentator yang berjumlah tujuh calon legislatif dengan kebanyakan komentar berasal dari Partai Persatuan daerah berjumlah empat komentator yakni Suhardi, Parasian Simbolon, Aria Rumini dan Suhardi. Selain itu komentator cenderung yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR.

Pada tanggal 19 Februari 2009 merupakan edisi ke-16, pihak media mengangkat topik mengenai bagaimana kesejahteraan petani. Komentator yang ikut serta berjumlah delapan dan cenderung yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Komentator berasal dari partai yang berbeda sehingga dapat dilihat kecenderungan opini yang diberikan.

Pada edisi ke-17 yakni tanggal 20 Februari, dimana topik yang diangkat mesin mengenai bagaimana kesejahteraan petani. Komentator yang diikuti oleh calon legislatif berjumlah delapan yang berasal dari partai yang berbeda-beda yakni partai Gerindra, Hanura, PKB, PKS, Partai Serikat Indonesia, Partai Bintang Reformasi, PDIP, PKB. Selain itu komentator cenderung mencalonkan diri sebagai anggota DPRD.

Tanggal 21 Februari 2009 merupakan edisi ke-18 dengan topik yang sama sebelumnya yakni membahas kesejahteraan petani. Komentator berjumlah delapan dari calon legislatif yang cenderung mencalonkan diri sebagai anggota DPR dengan partai yang berasal dari PDIP. Yakni Janri Pakinson, Harjoko dan ADI Hamid.

Pada tanggal 23 Februari 2009 yang merupakan edisi ke-19 kolom komentar Spanduk Calon Legislatif. Topik berganti yang membahas mengenai bagaimana mencegah praktik korupsi di kalangan DPR. Komentator berjumlah sepuluh, dimana cenderung yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD.

Edisi ke-20 pada tanggal 24 Februari 2009 dengan jumlah komentator Sembilan. Topik yang dibahas masih sama dengan edisi ke-19. Pada topik ini selalu diikuti oleh komentator yang berjumlah banyak. Komentator juga

cenderung mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dengan partai yang berbeda-beda.

Edisi ke-21 pada tanggal 25 Februari 2009 dengan jumlah komentator Sembilan dan masih membahas topik mengenai pencegahan praktik korupsi di DPR. Komentator banyak berasal dari partai PAN yang berjumlah 3 komentator yakni Novi herawati, Lestari dan Emmy Lumban wijaya.

Pada tanggal 27 Februari 2009 topik yang diangkat pihak media adalah bagaimana akses pengobatan murah dijangkau rakyat miskin. Edisi ini, komentator yang ikut serta cenderung yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD.

Tanggal 28 Februari 2009, pihak media masih mengangkat topik mengenai pengobatan murah yang dapat dijangkau rakyat miskin. Diikuti oleh tujuh calon legislatif yang cenderung mencalonkan diri sebagai DPRD dengan latar belakang partai yang berbeda.

Memasuki bulan Maret yakni pada tanggal 2 Maret 2009 yang merupakan edisi ke-24. Topik yang diangkat mengenai politik uang pada kampanye pemilu 2009. Opini yang berasal dari calon legislatif berjumlah 5 komentator dengan latar belakang partai yang berbeda. Komentator yang ikut cenderung yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR.

Edisi terakhir yakni ke-25 pada tanggal 3 Maret 2009 dengan topic yang diangkat masih mengenai politik uang pada kampanye. Edisi ini terdapat enam komentator, dimana terdapat satu nama partai yang memberikan dua wakil dari

partainya. Yakni dari partai Damai Sejahtera yang diwakilkan oleh Martin Perangiandin dan Mora Toa Situmora.

Deskripsi dari kolom komentar Spanduk Calon Legislatif setiap edisi dari tanggal 3 Februari 2009 – 3 Maret 2009 dapat dilihat kecenderungan bahwa calon legislatif yang berperan serta sebagai komentator pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif adalah cenderung yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Sedangkan DPD jumlahnya minimalis dibanding untuk anggota DPR. Komentator juga berasal dari partai yang berbeda-beda sehingga kita dapat mengetahui opini yang diberikan menyangkut topik yang diangkat sehingga dapat diketahui kecenderungan opini dari komentator.

BAB III

PEMAPARAN dan ANALISIS DATA

KOLOM KOMENTAR “SPANDUK CALON LEGISLATIF”

SURAT KABAR HARIAN UMUM KOMPAS

A. Analisis Isi

Studi penelitian ini secara umum akan menjelaskan kecenderungan yang ditampilkan oleh media cetak khususnya surat kabar Harian Umum Kompas dan kecenderungan isi pernyataan atau komentar yang terjadi di kalangan elit politik dari masing-masing tokoh calon legislatif terhadap tema-tema yang muncul pada setiap edisi kolom komentar “Spanduk Calon Legislatif” Harian Umum Kompas.

Dilihat dari tema-tema yang di ketengahkan pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif, ternyata konflik-konflik lama masih saja menjadi sorotan untuk dibahas karena pemerintah dianggap belum mampu untuk menyelesaikannya, ditambah lagi konflik baru yang harus dihadapi sebelum terselenggaranya Pemilu legislatif 2009 karena tidak dapat disangkal hari-hari mendekati Pemilu suhu politik semakin meningkat. Konflik yang terjadi bukan hanya antara beberapa partai sesama Organisasi Peserta Partai (OPP), tetapi juga terjadi di internal partai.

Konflik di Nusa Tenggara Barat tentang pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan calon legislatif berdasarkan suara terbanyak bukan nomor urut. Berbagai pendapat atau opini yang keluar dari para calon legislatif sehingga terjadi konflik antara yang pro dan kontra tewujud dalam peristiwa saling tebang bendera di internal partai tertentu. Selain itu juga di daerah-daerah tertentu antar sesama calon legislatif satu partai pun sudah ada yang menggunakan isu-isu SARA demi mendapatkan suara.

Potensi konflik ini menjadi semakin besar karena terhambatnya kaum perempuan menembus kursi legislatif, dianggap terjadi penyelewengan pada keputusan Mahkamah Konstitusi Pasal 214 Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu tidak punya kekuatan mengikat secara hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdasarkan suara terbanyak sehingga penempatan perempuan pada nomor urut dapat dipastikan. Terjadinya pro dan kontra bahkan terjadi pertarungan di kalangan para calon legislatif.

Bukan hanya permasalahan baru yang dibahas dalam kolom komentar Spanduk Calon Legislatif, tetapi permasalahan lama yang belum dapat dituntaskan oleh pemerintah pun diangkat kembali oleh pihak media surat kabar Harian Umum Kompas untuk dibahas bersama calon legislatif. Seperti kasus HAM yang hingga sekarang belum dapat dituntaskan oleh pemerintah.

Apabila dilihat sepintas pada tahun 2004, bahwa masyarakat percaya terhadap wakil rakyat beserta partainya yang menjadi jagoan mereka. Partai yang sangat progresif karena baru lahir dan menjanjikan perubahan menuju masyarakat yang madani. Tetapi pada akhirnya masalah pro Undang-Undang pornografi dan sudah mendapat kritikan karena dianggap sebagai gembong pelanggaran HAM. Oleh karena itu, kasus ini tetap dipertanyakan kepada calon legislatif untuk periode 2009-2014 nanti agar kejadian sebelumnya tidak terulang kembali.

Sama halnya dengan permasalahan lainnya yakni permasalahan yang menyangkut kesejahteraan rakyat pun tidak dilewatkan untuk dibahas didalam kolom komentar Spanduk Calon Legislatif. Seperti masalah kesehatan maupun pendidikan. Tentu saja kasus ini merupakan kasus lama yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah.

Melalui pendekatan analisis isi, penulis mencoba mengungkapkan secara sistematis perihal fakta dan informasi dari pernyataan atau pendapat dari masing-masing tokoh calon legislatif dari masing-masing perwakilan partai yang tercetak dalam kolom komentar Spanduk Calon Legislatif Harian Umum Kompas berkaitan dengan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, hukum yang tengah

dialami bangsa Indonesia sampai saat ini khususnya mendekati Pemilu legislatif 2009.

Untuk keperluan analisis data, telah terlebih dahulu dibuat coding sheet yang dipakai untuk mengkarakteristikan secara sistematis unit-unit analisis yang kemudian dilihat kemunculan kategori-kategori dalam tiap-tiap unit analisis yang sudah ditentukan. Terdapat 4 unit analisis yang telah ditentukan terdiri dari tema, proses opini, nada opini dan sifat opini dalam kolom komentar Spanduk Calon Legislatif selama 29 hari dan dikurangi 4 hari karena bertepatan dengan hari minggu, dimana surat kabar Harian Umum Kompas hanya menyajikan edisi hiburan saja.

Maka untuk jumlah pernyataan yang akan diberi kode oleh pengkode dari masing-masing unit analisis berjumlah 25 buah Kolom Komentar Spanduk Calon Legislatif. Jumlah pernyataan atau opini berdasarkan frekuensi kemunculan masing-masing komentator selama 25 hari dan setiap harinya diikuti oleh calon legislatif sebagai komentator.

B. Frekuensi Kategori Tema dalam Kolom Komentar Spanduk Calon Legislatif Harian Umum Kompas.

Dari data coding, frekuensi kemunculan kategori Tema dari keseluruhan judul Tema yang dianalisis tampak dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
DISTRIBUSI FREKUENSI KATEGORI TEMA
KOLOM KOMENTAR SPANDUK CALON LEGISLATIF
HARIAN UMUM KOMPAS PERIODE 3 FEBRUARI- 3 MARET 2009

| NO | KATEGORI TEMA | FREKUENSI | % |
|----|------------------|-----------|------|
| 1 | Politik | 2 | 22% |
| 2 | Hukum | 1 | 11% |
| 3 | Ekonomi | 1 | 11% |
| 4 | Sosial | 5 | 44% |
| | Jumlah | 9 | 100% |

Sumber : Hasil Coding Sheet

Hasil coding untuk kategori tema pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif Harian Umum Kompas, terdiri dari Tema politik, ekonomi, hukum dan sosial. Terlihat bahwa untuk kategori tema sosial jumlah kemunculan sebanyak 4 kali dengan persentase yang 44%. Konflik sosial menjadi sorotan utama oleh pihak media Kompas dan termasuk permasalahan yang belum dapat diselesaikan pemerintah Indonesia, terutama menyangkut kesejahteraan rakyat miskin.

Pada tema sosial pembahasan banyak terkait permasalahan mengenai anggaran dana APBN sebesar 20% untuk pendidikan rakyat miskin. Pandangan para tokoh calon legislatif menilai pemerintah tidak efisien dan kurang efektif dalam mendistribusikan anggaran tersebut. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam memberikan sekolah gratis hanya untuk pembayaran SPP bulanan saja tetapi untuk membeli keperluan sekolah seperti seragam murid dan peralatan instrument sekolah lainnya sulit dijangkau rakyat miskin. Selain itu, kebijakan pemerintah mengenai sekolah gratis tidak menyebar keseluruh Indonesia.

Komentator cenderung memberikan solusi untuk agar pemerintah dalam pembagian dana 20% anggaran pendidikan harus jelas alokasinya dan dimanfaatkan tepat sasaran serta diperlukan komitmen yang kuat untuk pengawasan mulai dari penyusunan samai dengan pelaksanaannya.

Masalah sosial lainnya yang menjadi perhatian komentator yakni pemecahan dana untuk alokasi APBN dan APBD mengenai penyelenggaraan pengobatan murah. Kesehatan adalah modal awal untuk pembangunan bangsa selain pendidikan. Tokoh calon legislatif sebagai komentator lebih cenderung mengemukakan pendapat agar pemerintah baik pusat maupun daerah saling bekerjasama dalam menyelenggarakan kesehatan murah pada rumah sakit dan pengobatan gratis pada puskesmas.

Kecenderungan tema sosial lainnya yang dibahas dalam Kolom Komentar Spanduk Calon Legislatif yakni mengenai permasalahan peningkatan kaum buruh dan para petani. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang perburuhan dan terakhir SKB empat Menteri membuat nasib buruh semakin runyam. Menunjukkan pemerintah kurang berpihak pada buruh. Atas dasar itulah para aktivis perburuhan berpendapat untuk masuk ke dalam parlemen dengan dibantu oleh pihak media Kompas yang mengangkat permasalahan ini ke dalam Kolom Komentar Spanduk Calon Legislatif. Komentator cenderung memberikan opini berupa langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan pemerintah dengan memperkuat Undang-Undang perburuhan agar lebih berpihak kepada rakyat. Tetapi tidak menutup kemungkinan komentator cenderung tidak mendukung terhadap sikap pemerintah selama ini yang mengabaikan nasib buruh padahal

apabila dilihat dari roda perekonomian bangsa, buruh merupakan salah satu faktor produksi yang sangat menentukan.

Berbeda dengan permasalahan kaum buruh, permasalahan mengenai kaum perempuan dalam kancah politik kembali dipertanyakan. Pandangan tokoh calon legislatif cenderung lebih setuju dan menganggap tidak menjadi soal jika perempuan berkiprah di panggung politik dan justru merupakan salah satu jalan yang paling tepat untuk pemberdayaan perempuan melalui partai politik agar adanya keadilan dan kesetaraan gender.

Berikut contoh salah satu komentar yang terdapat pada Spanduk Calon Legislatif berdasarkan kategori tema sosial.

Topik : Kebijakan Afirmatif Perempuan

Komentar :

Tidak setuju. Kebijakan afirmatif justru merendahkan perempuan. Katanya harus setara, tetapi diberi khusus. Itu melecehkan perempuan, terutama Ibu Kartini. Wahai kaum perempuan jangan mau diberi perlakuan khusus. Padahal sangat banyak yang berprestasi dan kemampuannya lebih.

Topik : Pendidikan makin sulit dijangkau rakyat miskin

Komentar :

Betul, makin sulit dijangkau apalagi untuk pendidikan yang berkualitas. Dana OBS hanya cukup untuk pendidikan di bawah standar. SD sekarang harus diwajibkan ada pelajaran bahasa Inggris dan computer lengkap dengan labnya.

Topik : Mengangkat nasib para petani

Komentar :

Harus ada program pendampingan yang membekali keterampilan para petani untuk mengolah hasil panennya dalam komoditas yang beragam sehingga

selain mendapatkan tambahan penghasilan juga menjamin harga hasil panennya tetap stabil.

Topik: Mengangkat nasib buruh

Komentar :

Buruh menanam saham di perusahaan. Pemerintah harus dapat memfasilitasi itu dengan pengusaha dan legislatif buat UU yang menguatkan.

Topik : Bagaimana agar rakyat memperoleh akses terhadap pengobatan murah

Komentar :

DPR, DPRD, dan pemerintah wajib melayani rakyat dibidang kesehatan dengan mendorong biaya kesehatan murah di rumah sakit gratis pada puskesmas karena hal mendasar ini langsung dirasakan oleh rakyat

Tema yang tidak pernah lepas juga dari sorotan publik yakni tema politik berada diposisi setelah Tema sosial, dengan frekuensi kemunculan sebanyak 2 kali dengan persentase 22%. Adapun konflik yang diangkat dari Tema politik mengenai sistem pemerintahan terutama menyangkut kinerja dari DPR periode 2009-2014 apakah jauh lebih baik dari periode sebelumnya, serta membahas persoalan politik uang dalam kampanye Pemilu legislatif 2009, yang semakin gencar dilakukan setiap Pemilu diselenggarakan dengan memberikan uang kepada rakyat dalam mencari dukungan atau massa yang banyak.

Komentator cenderung memberikan opini bahwa kinerja DPR selanjutnya tergantung dari rakyat. yang akan memilih wakil mereka nanti. Disebabkan selama ini rakyat masih memilih karena uang yang dibagi-bagikan partai pada waktu kampanye berlangsung. Permasalahan mengenai *money politic* menjadi pembahasan yang pada Kolom Komentar Spanduk Calon Legislatif, adapun

kecenderungan opini yang diberikan komentator terkait bahwa anggota legislatif sulit untuk menghindari *money politic* dalam kampanye politik 2009 ini. Karena dianggap sudah menjadi suatu kebiasaan dari kehidupan politik di Indonesia untuk mencari simpatian dari rakyat.

Berikut contoh salah satu komentar berdasarkan kategori tema politik pada Kolom Komentar Spanduk Calon Legislatif Harian Umum Kompas.

Topik : Apakah wajah DPR mendatang akan lebih baik

Komentar :

Kalau saya kira, wajah di DPR 2009-2014 belum baik karena rakyat masih memilih karena uang bukannya memilih dengan kecerdasan dan jiwa yang bersih.

Topik : Sulitkah menghindari politik uang dalam kampanye politik 2009

Komentar :

Sangat sulit. karena politik uang telah lama tertanam kuat pada birokrasi dan praktik politik kita, selama 32 tahun lebih pada zaman orde baru sampai saat ini. Penebabnya di satu sisi karena politik uang itu dianggap sebagai salah satu instrument dan strategi efektif untuk mempertahankan, merebut, memperoleh kedudukan dan kekuasaan bagi para aktor dan kompetitor politik ikut bersaing.

Sedangkan pada tema hukum dan ekonomi berada pada posisi yang sama yakni dengan persentase 11% dan frekuensi hanya 1 kali. Pada tema ekonomi, hanya membahas korupsi di parlemen yakni apakah calon legislatif periode 2009-2014 masih mengalami kesulitan untuk menghindari praktik korupsi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan pemberantasan korupsi menjadi agenda setiap calon legislatif yang dilihat dari kecenderungan komentator mengemukakan opini bahwa penjara saja tidak cukup karena tidak membuat para koruptor jera atas perlakuan mereka. Adapun solusi untuk rakyat dalam menghindari korupsi

berdasarkan kecenderungan komentar agar rakyat tidak memilih calon legislatif yang memberikan uang pada waktu berkampanye.

Berikut contoh komentar Spanduk Calon Legislatif berdasarkan kategori tema ekonomi.

Topik : Mencegah anggota DPR tidak melakukan praktik korupsi

Komentar :

Tumbuh kembangkan budaya malu korupsi dan jadikan anggota DPR insan yang takut kepada Tuhan. Untuk itu tambah agenda pembinaan mental spiritual sekali seminggu yang wajib diikuti oleh seluruh anggota DPR dengan sanksi yang tegas dan ekspose ke masyarakat luas bagi yang mangkir.

Sedangkan pada tema hukum hanya difokuskan pada permasalahan yang menyangkut peradilan HAM. Karena dinilai konflik yang hingga kini belum dapat dituntaskan oleh pemerintah Indonesia. Apalagi mengingat situasi parlemen yang plural serta banyak kepentingan politik luar biasa. Oleh karena itu, pihak media mengangkat permasalahan HAM untuk mengetahui pernyataan dari calon legislatif mengenai kinerja DPR mendatang dalam menuntaskan kasus HAM yang terabaikan selama ini. Komentator cenderung mendukung atau optimis kalau kinerja DPR mendatang dapat menuntaskan kasus HAM yang terabaikan. Terlihat dari visi dan misi calon legislatif agar penyelesaian kasus HAM dimasukkan kedalam agenda kinerja DPR mendatang.

Berikut salah satu komentar berdasarkan kategori tema hukum pada Kolom Komentar “ Spanduk Calon Legislatif ”.

Topik : DPR mendatang bisa menuntaskan kasus-kasus HAM yang terabaikan

Komentar :

Agak sulit dituntaskan, karena semua tergantung dari komitmen caleg yang bersangkutan. Apabila pikiran mereka di DPR Cuma mau mencari nafkah saja, masalah HAM tidak akan terselesaikan.

Jelas bahwa kecenderungan yang tampak untuk kategori tema adalah kategori sosial. Pihak media mengangkat suatu topik yang menyangkut suatu realita di dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi suatu isu yang diangkat oleh surat kabar. Seperti topik yang diangkat oleh pihak media pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif yaitu mengenai peningkatan nasib kaum buruh dan kaum petani. Dimana bertepatan mendekati Pemilu legislatif, permasalahan kaum buruh mulai dipertanyakan terutama mengenai kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada kaum buruh. SKB empat Menteri terakhir membuat nasib kaum buruh semakin runyam yang menjelaskan bahwa kaum buruh tidak menjadi suatu bagian di dalam parlemen. Padahal apabila dilihat dari roda perekonomian bangsa, buruh merupakan salah satu faktor sumber untuk keuangan Negara karena buruh merupakan salah satu produksi yang sangat menguntungkan. (Kompas, 5 Februari 2009 : hal 5)

Oleh karena itu, para aktivis perburuhan berpendapat untuk masuk ke dalam parlemen dengan dibantu oleh pihak media dengan mengangkat permasalahan ini menjadi suatu isu sehingga menimbulkan opini dari berbagai pihak yakni calon legislatif pada khususnya. Permasalahan mengenai nasib kaum buruh mulai ramai dibicarakan pada tanggal 4 Februari 2009, dimana tanggal tersebut bertepatan dengan edisi kolom komentar Spanduk Calon Legislatif yang ke-3. Isyu ini diangkat oleh pihak media Kompas sebagai topik untuk dibahas

bersama dengan calon legislatif pada tanggal 5 Februari 2009 sehingga menimbulkan suatu sikap berupa opini yang dapat dilihat kecenderungan dari masing-masing opini tersebut. Komentator cenderung memberikan solusi kepada pemerintah, bahkan komentator cenderung tidak menyetujui kebijakan pemerintah yang mengabaikan nasib buruh.

Kecenderungan tema sosial yang diangkat pihak media Kompas sebagai wujud dari perwakilan rakyat, karena media sebagai sosial kontrol yang mengangkat isu menyangkut kehidupan masyarakat. Tema sosial yang menjadi topik yang banyak diangkat pihak media Kompas pada kolom komentar Spanduk calon Legislatif menunjukkan bahwa permasalahan menyangkut kesejahteraan rakyat belum sangat diperhatikan pemerintah. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih kurang menguntungkan bagi rakyat, karena masih banyak sikap pro dan kontra diberbagai kalangan terutama calon legislatif.

C. Frekuensi Kategori Proses Opini Pada Kolom Komentar Spanduk Calon Legislatif Harian Umum Kompas

Pada bagian ini, menjelaskan dan memaparkan kecenderungan opini yang tampak berdasarkan kategori Proses Opini meliputi aspek Personal, aspek Politik dan aspek sosial. Maka hasil dari coding sheet dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II
DISTRIBUSI FREKUENSI KATEGORI PROSES OPINI
KOLOM KOMENTAR SPANDUK CALON LEGISLATIF
HARIAN UMUM KOMPAS PERIODE 3 FEBRUARI-3 MARET 2009

| NO | KATEGORI | FREKUENSI | % |
|----|----------|-----------|---|
|----|----------|-----------|---|

| PROSES OPINI | | | |
|--------------|----------------|-----|-------|
| 1 | Aspek Personal | 23 | 22,5% |
| 2 | Aspek Sosial | 3 | 3,0% |
| 3 | Aspek Politik | 76 | 74,5% |
| | Jumlah | 102 | 100% |

Sumber : hasil coding sheet

Berdasarkan kategori proses opini, terdapat 102 komentar yang dapat diketahui kecenderungan opini yang tampak pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif. Maka kecenderungan opini yang tampak berdasarkan kategori proses opini yakni pada aspek Politik sebanyak 76 kali dan persentasenya berjumlah 74,5%. Dijelaskan bahwa komentator lebih cenderung mengemukakan pendapat berupa tanggapan terhadap kinerja pemerintah dengan kegiatan para pejabat publik yang dihubungkan dengan opini publik menyangkut penyelenggaraan Negara dan penyelesaian berbagai masalah yang sangat kompleks dan berkembang baik permasalahan yang baru berkembang maupun yang sudah lama tetapi belum ada penyelesaian dari pemerintah. Komentar mencakup secara luas dan mengatasnamakan publik tidak secara perseorangan maupun tidak mengatasnamakan Partai masing-masing komentator. Berikut contoh komentar kategori aspek politik.

“Rencana kebijakan afirmatif untuk perempuan dalam bentuk Perpu tidak perlu dilakukan karena berlawanan dengan rasa keadilan yang harus menjunjung tinggi prinsip dasar demokrasi bahwa penetapan calon anggota legislatif terpilih dengan suara terbanyak. Kebijakan afirmatif dapat dilakukan secara internal dalam partai politik masing-masing pada saat penetapan calon

legislatif dengan mempertimbangkan perwakilan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan. “ (Kompas, 4 Februari 2009)

Kategori aspek personal pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif frekuensi kemunculan sebanyak 23 kali (22,5%). Menunjukkan bahwa komentator juga lebih cenderung mengemukakan opini secara subyektif dan mengarah pada pendapat pribadi sesuai dengan kredibilitas dan kapabilitas dari masing-masing komentator terhadap tema-tema pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif. Komentator lebih banyak menggunakan kata seperti Saya ataupun aku dan opini yang dikemukakan lebih bersifat pribadi serta tidak mengatasnamakan Partai dari perwakilan masing-masing komentator.

“Jika pemberian kursi ketiga kepada perempuan untuk Pemilu 2009, saya tidak setuju karena norma Undang-Undang hanya mengatur afirmatif untuk penyusunan daftar calon legislatif. Mendorong KPU membuat pengaturan tentang ini akan menyebabkan banyaknya sengketa pada Pemilu legislatif.” (Kompas, 3 Februari 2009)

Sedangkan opini lainnya yang terdapat pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif selain kecenderungan aspek Politik dan aspek Personal, maka opini lainnya yang tampak pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif adalah aspek Sosial dengan frekuensi kemunculan paling rendah yakni hanya sebanyak 3 kali dengan jumlah persentasenya hanya 3,0%. Diartikan bahwa rendahnya komentar yang cenderung mengemukakan opini mengatasnamakan partai perwakilan komentator, bukan atasnama pribadi tetapi lebih kepada penggunaan kata-kata kita atau kami pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif Harian Umum Kompas. Berikut contoh komentar kategori aspek sosial.

“Strategi kampanye anti politik uang tidak mudah karena rakyat yang masih miskin dan kurang pendidikan. Jadi pesta demokrasi Pemilu dianggap kesempatan mumpung untuk mencari penghasilan. Kami selalu bilang kepada rakyat apabila kami sudah kasih uang kepada kalian setelah terpilih nanti kami tidak perlu mengurus kalian lagi karena suara kalian sudah kami beli.” (Kompas, 2 Maret 2009)

Kecenderungan pada aspek politik sangat erat kaitannya dengan kecenderungan tema sosial yang diangkat oleh pihak media Kompas. Aspek politik merupakan pernyataan yang menghubungkan antara opini publik dengan kebijakan pemerintah. Dimana kecenderungan tema sosial yang diangkat pada pihak media yang menyangkut kesejahteraan rakyat selalu dikaitkan dengan kebijakan pemerintah sehingga menimbulkan pembentukan suatu sikap dalam opini yang dapat dilihat kecenderungan dari masing-masing opini yang ada.

D. Frekuensi Kategori Nada Opini Pada Kolom Komentar Spanduk Calon Legislatif Harian Umum Kompas

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kecenderungan opini yang tampak pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif Harian Umum Kompas berdasarkan kategori Nada Opini yang terdiri dari Favourable dan Unfavourable. Akan dilihat kecenderungan nada opini yang tampak dari masing-masing opini komentator, pada tabel berikut ini :

Tabel III
DISTRIBUSI FREKUENSI KATEGORI NADA OPINI
KOLOM KOMENTAR SPANDUK CALON LEGISLATIF
HARIAN UMUM KOMPAS PERIODE 3 FEBRUARI-3 MARET 2009

| NO | KATEGORI NADA OPINI | FREKUENSI | % |
|----|------------------------|-----------|-------|
| 1 | Favourable | 49 | 45,4% |
| 2 | Unfavourable | 59 | 54,6% |
| | Jumlah | 108 | 100% |

Sumber : hasil coding sheet

Hasil coding, menunjukkan bahwa kecenderungan opini yang tampak berdasarkan kategori nada opini pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif Harian Umum Kompas yaitu lebih cenderung Unfavourable yakni opini komentator lebih cenderung tidak mendukung atau tidak setuju dengan kebijakan dan kinerja pemerintah selama ini. Opini dari komentator tidak mendukung dari tema yang diangkat oleh pihak media. Seperti pada tema sosial, kecenderungan opini komentator terhadap pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Selain itu komentator juga cenderung tidak mendukung kebijakan baru pemerintah serta tidak mendukung kemampuan kinerja anggota DPR periode 2009-2014. Hal ini dibuktikan dari hasil coding sheet dilihat frekuensi kemunculan sebanyak 59 kali dengan jumlah persentase 54,6%. Diartikan komentator menginginkan suatu perubahan untuk kemajuan yang baik.

“ Buruh yang selama ini diperhatikan seakan semuanya berada di darat padahal buruh laut yang jumlahnya tidak kalah banyak. Kesejahteraan buruh di laut, di pelabuhan dan pantai terbengkalai. “(Kompas, 5 Februari 2009)

“ Buruh selama ini hanya dieksploitasi untuk kepentingan politik. Guna mengangkat harkat dan martabat buruh secara nasional. Pemerintah pusat,

Propinsi dan kabupaten/kota harus peka didalam menyimak masalah buruh dan memberi solusi yang sesuai dengan harkat dan martabat.”(Kompas, 6 Februari 2009)

“ DPR mendatang akan sulit menjadi lebih baik. Soalnya terkait dengan kebijakan pemerintah berdasarkan sistem suara terbanyak maka sulit dipredikasi kualitas calon legislatif yang terpilih akan lebih baik. Meskipun dari aspek pendidikan ada peningkatan kualitas dan dari sisi usia ada proses peremajaan. Tetapi, kalau untuk meraih popularitas dan elektabilitas dengan cara menghambur-hambur uang, maka bisa dipastikan wajah DPR mendatang lebih bopeng dan karut marut. Proses-proses politik di Dewan akan semakin mahal.”(Kompas,12 Februari 2009)

Sedangkan kategori favourable yakni komentator yang cenderung mendukung atau setuju terhadap kebijakan pemerintah dan mendukung kinerja DPR periode 2009-2014 serta komentar yang dikemukakan mendukung terhadap tema-tema yang diangkat pihak media Kompas. Adapun frekuensi kemunculan sebanyak 49 kali (45,4%). Berikut contoh komentar kategori favourable.

“Kebijakan afirmatif perempuan, Setuju! banyak calon legislatif perempuan yang dipaksakan untuk memenuhi persyaratan formulasi belum tentu teruji kualitasnya jadi harus benar-benar disaring.” (Kompas, 4 Februari 2009)

“DPR mendatang akan lebih baik dari pada yang ada sekarang ini. Karena DPR yang terpilih nanti benar-benar pilihan rakyat.” (Kompas 11 Februari 2009)

Hal ini membuktikan bahwa Kecenderungan nada opini yang tampak pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif adalah Unfavourable. Erat kaitannya dengan kecenderungan tema dan proses opini. Tema sosial yang menyangkut kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk kesejahteraan rakyat

banyak menimbulkan suatu sikap dari calon legislatif yang unfavourable terhadap pemerintah. Pada tema sosial yang mengangkat permasalahan mengenai kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan nasib buruh untuk tidak masuk ke dalam kursi parlemen melahirkan suatu sikap unfavourable dari calon legislatif. Mereka menilai bahwa kebijakan pemerintah tidak efektif dan tidak memperhatikan bahwa buruh merupakan salah satu faktor yang menguntungkan untuk roda perekonomian Negara. Pada kebijakan pemerintah mengenai pendidikan sekolah gratis, dimana hanya untuk pembayaran SPP saja dan itupun tidak menyebar di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Kebijakan ini dinilai calon legislatif tidak efektif dan kurang efisien.

Suatu kesimpulan yang positif karena menunjukkan bahwa calon legislatif lebih cenderung menginginkan perubahan yang lebih baik dan jelas mengenai permasalahan yang menyangkut dengan tema yang disajikan pihak media.

E. Frekuensi Kategori Sifat Opini Pada Kolom Komentar Spanduk Calon Legislatif Harian Umum Kompas

Hasil dari coding untuk kategori sifat opini dijelaskan mengenai kecenderungan sifat opini yang tampak pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif yang dibagi menjadi Kritik dan Saran. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV
DISTRIBUSI FREKUENSI KATEGORI SIFAT OPINI
KOLOM KOMENTAR SPANDUK CALON LEGISLATIF
HARIAN UMUM KOMPAS PERIODE 3 FEBRUARI-3 MARET 2009

| NO | KATEGORI SIFAT OPINI | FREKUENSI | % |
|----|-------------------------|-----------|-------|
| 1 | Saran | 100 | 64,1% |
| 2 | Kritik | 56 | 35,9% |
| | Jumlah | 125 | 100% |

Sumber : hasil coding sheet

Hasil coding, untuk kategori sifat opini, maka dapat dilihat kecenderungan opini yang tampak dari komentator. Bahwa opini yang diberikan oleh komentator cenderung bersifat saran. Terlihat dari frekuensi kemunculan sebanyak 100 kali (64,1%). Yakni komentator cenderung mengemukakan opini dengan memberikan usulan, himbauan dan pemecahan masalah dari tema-tema yang di ketengahkan pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif Harian Umum Kompas.

Hal ini menunjukkan bahwa calon legislatif dalam mencari solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang ada selalu dibicarakan secara bersama-sama dengan menempatkan semua kepentingan berdasarkan atas tanggung jawab bersama. Serta lebih mengarah pada bukti kepedulian dari calon legislatif demi kemajuan dan perkembangan untuk keluar dari masalah terhadap tema-tema yang disajikan oleh pihak media.

“Pemerintah harus menjamin kebebasan berserikat bagi buruh, menambah kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan di daerah, menerapkan program K3 dengan disiplin, mengembalikan kewenangan ketenagakerjaan ke pusat, membuat apartemen atau rusun dekat kompleks industry dan meningkatkan pendidikan buruh minimal setara SMA.” (Kompas, 6 Februari 2009)

Sedangkan opini yang tampak pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif untuk kategori sifat opini kritik hanya berjumlah persentase 35,9% dan frekuensi kemunculannya hanya sebanyak 56 kali. Komentar yang bersifat kritik lebih banyak ditujukan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah secara menyeluruh dengan tujuan agar setiap kebijakan yang dibuat hendaknya berdasarkan tuntutan dan keinginan rakyat Indonesia sehingga kebijakan itu sendiri tidak mementingkan suatu kelompok atau golongan tertentu.

“ Banyak kasus HAM yang terabaikan. Ini semua masalah niat baik. Sebab pada umumnya kasus dijadikan sebagai objek untuk mendapatkan popularitas. Belum lagi kasus itu melibatkan kader partai politik tertentu.”(Kompas, 17 Februari 2009)

Diharapkan juga kritikan yang diberikan bukan hanya sekedar mengkritik demi kepentingan salah satu golongan tertentu saja. Namun lebih menempatkan bagaimana seharusnya. Sehingga baik saran maupun kritik dapat diakomodir secara bersama sebagai pertimbangan untuk mencari solusi yang tepat untuk kepentingan bersama dalam menangani berbagai masalah pokok yang kini tengah melanda bangsa Indonesia demi mewujudkan wajah Indonesia yang lebih baik sesuai cita-cita bangsa.

kecenderungan pada kategori sifat opini tampak pada kategori saran. Jelas bahwa dari kaitannya dengan kecenderungan tema sosial, aspek politik yang menimbulkan sikap unfavourable sehingga menimbulkan suatu saran dari calon legislatif pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif. Kecenderungan dari sikap unfavourable terhadap kebijakan pemerintah sehingga menimbulkan suatu

solusi atau saran yang ditujukan kepada pemerintah berupa langkah-langkah yang seharusnya.

Kebijakan pemerintah mengenai distribusi anggaran 20% untuk pendidikan rakyat miskin dianggap calon legislatif kurang efisien karena dana tersebut hanya dialokasikan untuk pembayaran SPP saja sedangkan untuk operasional sekolah seperti seragam murid dan peralatan instrument sekolah lainnya tidak berasal dari pemerintah atau dianggap sebagai tanggungan dari murid yang bersangkutan. Tentu saja kebijakan pemerintah menimbulkan suatu sikap unfavourable dari calon legislatif karena menganggap bahwa justru biaya operasional yang sulit dijangkau rakyat miskin.

Oleh karena itu, calon legislatif cenderung memberikan saran kepada pemerintah dalam pembagian dana 20% anggaran pendidikan harus jelas alokasinya dan dimanfaatkan tepat sasaran serta diperlukan komitmen yang kuat untuk pengawasan mulai dari penyusunan sampai dengan pelaksanaannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penyajian dan analisis data yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan

1. Tema

Dari hasil coding, untuk kategori tema pada Kolom Komentar Spanduk Calon Legislatif Harian Umum Kompas. Terlihat bahwa kecenderungan tema yang menjadi fokus pihak media untuk dibahas di dalam kolom komentar Spanduk Calon Legislatif adalah tema sosial dengan frekuensi sebanyak 5 kali (44%). Menunjukkan bahwa permasalahan dalam bidang sosial hingga saat ini belum dapat diselesaikan secara merata oleh pemerintah. Menyangkut pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan petani dan buruh yang belum diperhitungkan.

2. Proses Opini

Dari hasil coding berdasarkan kategori proses opini yang meliputi aspek personal, aspek politik dan aspek sosial dengan hasil bahwa kecenderungan isi opini yang tampak yakni terdapat pada aspek politik dengan kemunculan sebanyak 76 kali dan frekuensi relatif 74,5%. Menunjukkan bahwa komentator cenderung mengemukakan opini terhadap kinerja pemerintah yang dihubungkan dengan opini publik menyangkut penyelenggaraan Negara.

3. Nada Opini

Kecenderungan opini yang tampak pada Kolom Komentar Spanduk Calon Legislatif berdasarkan nada opini yaitu lebih cenderung Unfavourable dengan frekuensi 59 kali (54,6%). Membuktikan bahwa komentar dari calon legislatif cenderung tidak mendukung atau tidak setuju terhadap kinerja pemerintah

serta tidak mendukung tema yang diketengahkan oleh pihak media Kompas. Hal ini menunjukkan bahwa calon legislatif menginginkan suatu perubahan untuk kemajuan dan perubahan yang lebih baik.

4. Sifat Opini

Kecenderungan sifat opini yang tampak pada Kolom Komentar Spanduk Calon Legislatif yang dibagi menjadi kritik dan saran. Maka dari hasil coding terlihat kecenderungan opini bersifat saran dengan frekuensi sebanyak 100 kali (64,1%). Menunjukkan bahwa komentator cenderung memberikan saran kepada pemerintah sebagai solusi dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran-saran yang meliputi :

1. Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan baik secara konseptual maupun operasional. Penelitian ini hanya dilakukan pada isi media dengan metode analisis isi pada kolom komentar Spanduk Calon Legislatif periode 3 Februari – 3 Maret 2009. Analisis isi dilakukan berdasarkan 4 unit analisis beserta kategori-kategori yang telah ditentukan. Analisis dilakukan dengan perhitungan manual sehingga dimungkinkan terjadi kesalahan dalam perhitungan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya

diharapkan dapat melakukan penyempurnaan atas keterbatasan dalam penelitian ini.

2. Peneliti selanjutnya yang menggunakan metode analisis isi pada surat kabar diharapkan dapat memilih isi media dengan format yang lebih sempurna dan lengkap daripada Kolom Komentar yang lebih sederhana.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan pendalaman sebagai perbendaharaan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya dan mahasiswa Komunikasi pada khususnya.

